

KAAN
PMK

BERGERAK & BERTUMBUH

CITA-CITA . SASARAN . STRATEGI
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

2015 - 2019

dalam
Infografis

nb16-074

**INVENTARIS PERPUSTAKAAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**

TANGGAL MASUK 16 - NOV - 15
ASAL Persidangan
NOMOR INVENT _____
NOMOR PANGGIL _____

BERGERAK & BERTUMBUH

CITA-CITA . SASARAN . STRATEGI
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

2015 - 2019

dalam
Infografis

SUSUNAN REDAKSI



Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat
www.kominfo.go.id

Editor Ahli

Sekretaris Utama, Bappenas

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Bappenas

Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Bappenas

Deputi Bidang Ekonomi, Bappenas

Direktur Aparatur Negara, Bappenas

Direktur Hukum dan HAM, Bappenas

Direktur Pertahanan dan Keamanan, Bappenas

Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Bappenas

Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Bappenas

Sonny Harry B. Harmadi

Pengarah

Penanggung jawab

Editor

Freddy H Tulung

Siti Meiningsih

Nursodik Gunarjo

Akhyari Hananto (GNFI)

Penulis

Dimas Aditya Nugraha

Septa Dewi Anggraeni

Nuniek Aprianti Wibowo

Riana Riskinandini

Anastasya

Uji Agung Santosa

Yusri Evalina S. Sinambela

Titania Nurrahim

RM Ksatria Bhumi Persada

Pencari Data

Yudi Syahril

Rokayah

Naca

Tri Murwanti

Syafaat

Heryadi

Lucy Tri Amintasari

Lalu Muhammad Fahri

Desain Grafis

Rolip Saptamaji (Poligrabs)

Danang Firmansyah

Dhewangga A. Perdana (Poligrabs)

Tri Sepdian A. Faudji



MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang merupakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Dengan berpayung kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN tersebut,

RPJMN 2015-2019 disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (Nawa Cita) Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, dengan menggunakan Rancangan Teknokratik yang telah disusun Kementerian PPN/Bappenas dan berpedoman pada RPJPN 2005-2025. RPJMN 2015-2019 adalah pedoman untuk menjamin pencapaian visi dan misi Presiden, sekaligus untuk menjaga konsistensi arah pembangunan nasional sesuai dengan tujuan di dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan RPJPN 2005-2025.

Sebagai dokumen publik, RPJMN 2015-2019 harus disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Pentingnya informasi bagi setiap warga negara telah dipahami oleh negara sebagai suatu hak yang harus diberikan kepada masyarakat sebagaimana telah diamanatkan dalam UUD 1945. Penyediaan informasi publik ini merupakan ekspresi dari upaya memenuhi hak atau kemerdekaan masyarakat untuk memperoleh informasi (*public right to know*). Sedangkan fungsi penyebaran informasi merupakan ekspresi dari kewajiban pemerintah dan negara untuk menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat (*obligation to tell*). Lebih lanjut, kebijakan nasional seperti RPJMN yang mendasari kebijakan sektoral dan daerah juga perlu dipahami secara umum oleh masyarakat seperti target dan sasaran umum pembangunan untuk setiap masa pemerintahan Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat.

Kementerian Komunikasi dan Informatika karena sejalan dengan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kehumasan pemerintah (*government public relations*), telah menyusun Paket Informasi Publik dengan mengemas ulang Buku RPJMN 2015-2019 dalam bentuk infografis agar lebih mudah dipahami masyarakat. Kemasan informasi dalam format infografis ini tentu jauh lebih menarik bagi pembaca, sekaligus lebih mudah dipahami oleh setiap pembacanya.

Oleh karena itu, melalui kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih sekaligus menyampaikan penghargaan atas inisiatif yang kreatif yang digagas oleh Kementerian Kominfo ini. Tentu ini menjadi bagian dari sekian banyak langkah Pemerintah dalam upaya menyebarluaskan informasi terkait isi dan kandungan RPJMN 2015-2019 ini. Semoga buku ini memberi manfaat dan memudahkan bagi siapa saja yang ingin memahami dengan lebih baik isi dan kandungan RPJMN 2015-2019. Terima kasih.

Andrinof A. Chaniago



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

Pemerintah telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. RPJMN sebagaimana yang dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 merupakan pedoman bagi seluruh komponen bangsa dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional secara sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi. RPJMN memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis sehingga diperlukan pemahaman masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan terhadap substansi yang terkandung di dalamnya. Melalui pemahaman tersebut, para pemangku kepentingan dapat mengambil posisi, berkolaborasi, dan pada akhirnya berpartisipasi aktif dalam berbagai program yang disusun dan dilaksanakan Pemerintah.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) sebagai kementerian yang melaksanakan tugas kehumasan pemerintah (*government public relation*) harus menyampaikan dan menjelaskan substansi RPJMN kepada masyarakat luas. Hal tersebut selain sebagai amanat Pemerintah untuk menyampaikan program kepada seluruh rakyat, termasuk juga sebagai upaya untuk memenuhi hak warga Negara untuk mengetahui apa yang akan dilakukan Pemerintah dalam administrasi dan pengelolaan Negara.

Saya menyambut baik upaya Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo yang telah menerbitkan buku "Bergerak dan Bertumbuh", yang berisi infografis tentang program-program pembangunan prioritas yang akan dilakukan Pemerintah dalam waktu lima tahun ke depan. Saya berharap, buku ini dapat menjadi sarana pendidikan masyarakat di ruang publik yang efektif.

Saya atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika menyampaikan pula penghargaan kepada Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, yang telah menginisiasi penerbitan buku ini. Saya haturkan pula terima kasih kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, yang telah memberikan izin dan mendukung penerbitan buku infografis ini. Sinergi dan koordinasi yang telah terjalin sangat berguna dalam rangka penyelesaian buku ini.

Semoga upaya kita dalam mencerdaskan masyarakat melalui penerbitan buku "Bergerak dan Bertumbuh" ini memiliki kebaikan dan kemanfaatan bagi pelaksanaan program pembangunan nasional.



DIREKTUR JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Pemerintah telah menerbitkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019. Dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan ini disusun atas amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang ditetapkan melalui Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019. RPJMN memuat tantangan, strategi kebijakan, dan target yang akan diambil untuk menjawab permasalahan nasional dalam lima tahun ke depan.

Namun demikian perlu disadari, bahwa sebagai dokumen teknis, data dan informasi yang terkandung di dalam RPJMN tidaklah mudah dipahami oleh masyarakat awam. Untuk itu, perlu dilakukan upaya agar masyarakat sebagai *stakeholder* utama pembangunan dapat lebih mudah membaca RPJM dengan konsep yang lebih ringkas, sederhana, dan membumi. Kemas ulang isi RPJMN sangat diperlukan agar lebih menarik dan mudah dicerna oleh masyarakat luas.

Terkait hal tersebut, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP) Kemenkominfo menerbitkan buku "Bergerak dan Bertumbuh". Buku ini merupakan kemas ulang isi RPJMN yang dituangkan dalam bentuk infografis. Dimuatnya berbagai tantangan, strategi kebijakan, dan target pembangunan dalam bentuk infografis dimaksudkan agar masyarakat memiliki gambaran yang lebih nyata tentang target-target utama pembangunan nasional serta peluang dan tantangan yang dihadapi.

Buku infografis ini tidak memuat secara lengkap seluruh hal yang tercantum di dalam RPJMN, akan tetapi lebih terfokus pada target-target pembangunan prioritas yang menyentuh hajat hidup orang banyak. Dengan demikian, masyarakat bisa mengetahui program-program pembangunan apa saja yang akan berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas kehidupan mereka di masa datang. Hal tersebut sejalan dengan semangat Nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ingin menghadirkan kembali negara dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada di tengah masyarakat.

Dengan tampilan yang lebih menarik, ringkas dan sederhana, buku ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang program-program pembangunan prioritas yang dilakukan pemerintah pada tahun 2015-2019. Dengan pemahaman yang baik, dukungan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan nasional diharapkan akan terus meningkat sehingga target-target yang diinginkan bisa tercapai secara optimal.

Freddy H. Tulung

DAFTAR ISI

Susunan Penulis	II
Sambutan Kepala Bappenas	III
Sambutan Menteri Kominfo	IV
Kata Pengantar Dirjen IKP	V
Daftar Isi	VI

BAB 1 **1**

KONDISI UMUM DAN LINGKUNGAN STRATEGIS **1**

- 3 Masalah Pokok Bangsa **2**
- Kerangka Ekonomi Membangun Negeri **4**
- Membangun Ekonomi Negeri yang Mandiri **6**
- Lingkungan Strategis (Tantangan Sekaligus Kesempatan bagi Indonesia) **8**

BAB 2 **11**

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL **11**

- Menuju Indonesia Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian **12**
- Rancangan Pembangunan Berkelanjutan **14**
- Nawacita **16**

BAB 3 **17**

AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL **17**

- Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa Dan Memberikan Rasa Aman Pada Seluruh Warga Negara **21**
- Mengembalikan Jatidiri Indonesia sebagai Negara Maritim **22**
- Memperkuat Sistem Pertahanan Indonesia **24**
- Mendayung diantara Dua Karang **26**
- Menjaga Para Pahlawan Devisa **28**
- Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih **30**

• Srikandi-Srikandi Indonesia	32	• Meningkatkan Produktivitas Rakyat Dan Daya Saing Di Pasar Internasional	67
• Dari Good Governance menjadi Democratic Governance	34	• Membangun Konektivitas, Memeratakan Pembangunan	68
• Membangun Indonesia Dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah2 Dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan	37	• Membangun Transportasi Umum, Mengurangi Kemacetan	70
• Makmur Indonesia Timur	38	• Hunian untuk Rakyat	72
• Menanggulangi Kemiskinan, Mengurangi Ketimpangan	40	• BUMN sebagai Agen Pembangunan	74
• Menjemput yang Tertinggal	42	• Bersaing di Pasar Global	76
• Memperkuat Kehadiran Negara Dalam Melakukan Reformasi Sistem Dan Penegakan Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat Dan Terpercaya	45	• Penguatan Investasi untuk Penguatan Ekonomi	78
• Melestarikan Alam, Melestarikan Masa Depan	46	• Menambah Laju Pertumbuhan Ekonomi	80
• Indonesia Melawan Narkoba	48	• Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakkan Sektor2 Strategis	83
• Mengatasi Benalu Negeri	50	• Menggenggam Harapan dari Lautan	84
• Perlindungan pada Anak dan Perempuan	52	• Memperkuat Ketahanan Energi Nasional	86
• Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Dan Masyarakat Indonesia	55	• Berdaulat Pangan di Negeri Agraris	88
• Ayo Sekolah!	56	• Menjaga Ketersediaan Air	90
• Meningkatkan Kesehatan, Menjaga Masa Depan	58	• Nyaman Berdampingan dengan Alam	92
• Menanggulangi Kemiskinan Mengurangi Ketimpangan	60	• Melakukan Revolusi Karakter Bangsa	95
• Perlindungan Hak Petani	62	• Revolusi Mental	96
• Indonesia yang Produktif	64		





**KONDISI UMUM
DAN LINGKUNGAN
STRATEGIS**



3 MASALAH POKOK BANGSA

Tantangan dalam menyelesaikan masalah - masalah bangsa :



1

Ancaman terhadap wibawa negara.

2

Kelemahan sendi perekonomian bangsa.

3

Intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.

Kondisi ini akan dipengaruhi oleh adanya lingkungan strategis berupa geo ekonomi, geo politik, demografi dan perubahan iklim

1



2



3



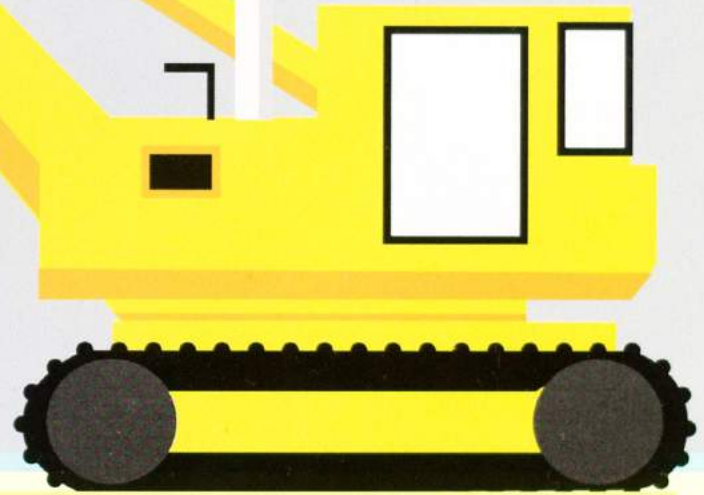
- Peningkatan stabilitas dan keamanan negara
- Pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien
- Pemberantasan korupsi

- Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan
- Percepatan, pemerataan dan keadilan
- Keberkelanjutan pembangunan

- Peningkatan kualitas SDM
- Pengurangan kesenjangan antar wilayah
- Percepatan pembangunan kelautan

KERANGKA EKONOMI MEMBANGUN NEGERI

Mewujudkan ekonomi yang lebih mandiri dan mendorong Indonesia ke arah yang lebih maju dan sejahtera melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dengan mendorong investasi, ekspor, konsumsi, maupun pengeluaran pemerintah.



PERTUMBUHAN EKONOMI RATA-RATA 7%



EKSPOR-IMPOR



INVESTASI

Rp 4.023,8
TRILIUN

Jumlah investasi pemerintah pusat dan daerah 2015-2019 akan mencapai Rp4.023,8 triliun.



2015-2019

Pertumbuhan Ekspor

\$ 14,3
MILYAR
2019

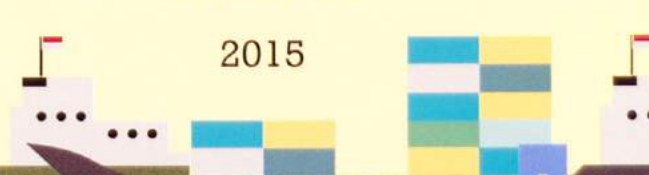
\$ 8,0
MILYAR
2015



PENDAPATAN PERKAPITA

\$ 12,3
MILYAR
2019

\$ 6,1
MILYAR
2015



MEMBANGUN EKONOMI NEGERI YANG MANDIRI

Pada **2019**
penerimaan pajak
ditargetkan **16%**
dari PDB



23.9%

Saat ini, **Indonesia** adalah **Negara**
dengan **Debt-to-GDP ratio**
terendah (terbaik) di ASEAN

SASARAN SEKTOR KEUANGAN



Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2020 di sektor keuangan, diupayakan kebijakan **penguatan sektor keuangan (termasuk perbankan)** di bidang **permodalan, aset, likuiditas dan strategi keuangan**.



Meningkatnya daya saing sektor keuangan nasional.

Meningkatnya fungsi intermediasi dan kedalaman sektor keuangan.

Meningkatnya akses masyarakat dan UMKM terhadap layanan jasa keuangan formal.

SASARAN PENGUATAN KAPASITAS FISKAL NEGARA



Azas perlakuan yang sama kepada bank asing (resiprokal) di lingkungan ASEAN perlu diupayakan, antara lain melalui **pembentukan kelompok bank pilihan** diantara negara anggota ASEAN (ASEAN Qualified Banks).



16%
PDB 2019

Meningkatnya penerimaan perpajakan menjadi sekitar 16% PDB pada 2019.

3,9%
PDB 2019

Meningkatnya kualitas belanja modal melalui **penghematan subsidi energi** dialokasikan pada belanja modal, sehingga naik dari 2,4% PDB pada 2015 menjadi 3,9% pada 2019.

19,3%
PDB 2019

Terjaganya rasio utang pemerintah dibawah 30% PDB dan terus menurun yang diperkirakan menjadi 20,0% PDB 2019.

LINGKUNGAN STRATEGIS

TANTANGAN SEKALIGUS KESEMPATAN BAGI INDONESIA

1

GEO EKONOMI

Pergeseran pusat ekonomi dunia ke kawasan Asia Pasifik .

Kontribusi Pendapatan Domestik Bruto (PDB) negara berkembang terhadap PDB Dunia :



2

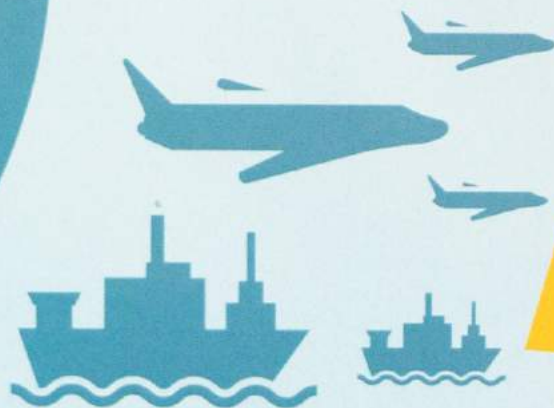
GEO POLITIK

Pergeseran gravitasi geostrategis dunia ke Asia Pasifik

Meningkatnya kekuatan ekonomi dan militer Cina



Perluasan kekuatan pertahanan dan keamanan Amerika Serikat dengan menggelar lebih banyak armada di Kawasan Asia Pasifik.



3

BONUS DEMOGRAFI

47,8%

Penduduk usia produktif pada 2015 - 2019



4

PERUBAHAN IKLIM

Komitmen Indonesia terhadap target penurunan emisi gas rumah kaca







**KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN
NASIONAL**



**MENUJU INDONESIA
BERDAULAT, MANDIRI
DAN BERKEPERIBADIAN**



7 VISI MISI PEMBANGUNAN NASIONAL

- 1 Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
- 2 Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
- 3 Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
- 4 Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
- 5 Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
- 6 Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
- 7 Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

RANCANGAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama.

Karena itu dibutuhkan output cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat



Pembangunan Pemerataan
dan Kewilayahan

Pemerataan antar wilayah;
desa, pinggiran, luar jawa,
kawasan timur Indonesia

Pemerataan antar
kelompok pendapatan

Pembangunan Sektor Unggulan dengan Prioritas

Kedaulatan Energi
dan Tenaga Listrik



Kedaulatan
Pangan

Kemaritiman
dan Kelautan

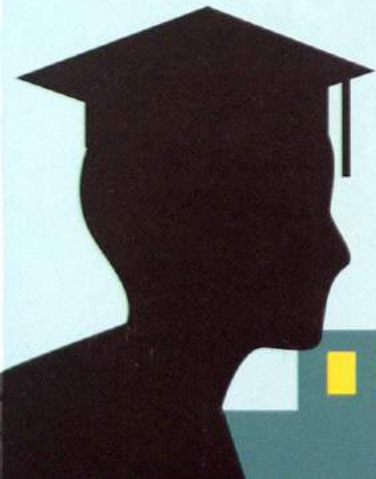


Pasiwisata
dan Industri



Pembangunan Manusia dan Masyarakat

Pendidikan



Kesehatan



Perumahan



Mental/Karakter





NAWACITA

Konsep NawaCita merupakan pedoman dan perpanjangan dari Trisakti Soekarno:

|| BERDAULAT DALAM POLITIK, BERDIKARI DALAM EKONOMI, DAN BERKEPRIBADIAN DALAM KEBUDAYAAN ||

GAGASAN BESAR UNTUK INDONESIA

- 1 Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
- 2 Pemerintah tidak absen dengan membangun Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
- 3 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- 4 Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- 5 Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
- 6 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
- 7 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- 8 Melakukan Revolusi Karakter Bangsa
- 9 Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia





**AGENDA
PEMBANGUNAN
NASIONAL**



**MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA
UNTK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA
DAN MEMBERIKAN RASA AMAN
PADA SELURUH WARGA NEGARA**

MENGEMBALIKAN JATIDIRI INDONESIA SEBAGAI NEGARA MARITIM



DEKLARASI DJUANDA

KONSEP NEGARA KEPULAUAN
MENDAPAT PENGAKUAN INTERNASIONAL.

KONFERENSI HUKUM LAUT
di Geneva tahun 1978

3/4
WILAYAH INDONESIA
ADALAH LAUTAN.

hak mengelola
200 MIL
ZONA EKONOMI
EKSKLUSIF

**GARIS PANTAI
TERPANJANG**
KEDUA DI DUNIA
(95.181 KM)
SETELAH KANADA

1,9 JUTA km²
Luas Darat

5,8 JUTA km²
Luas Laut

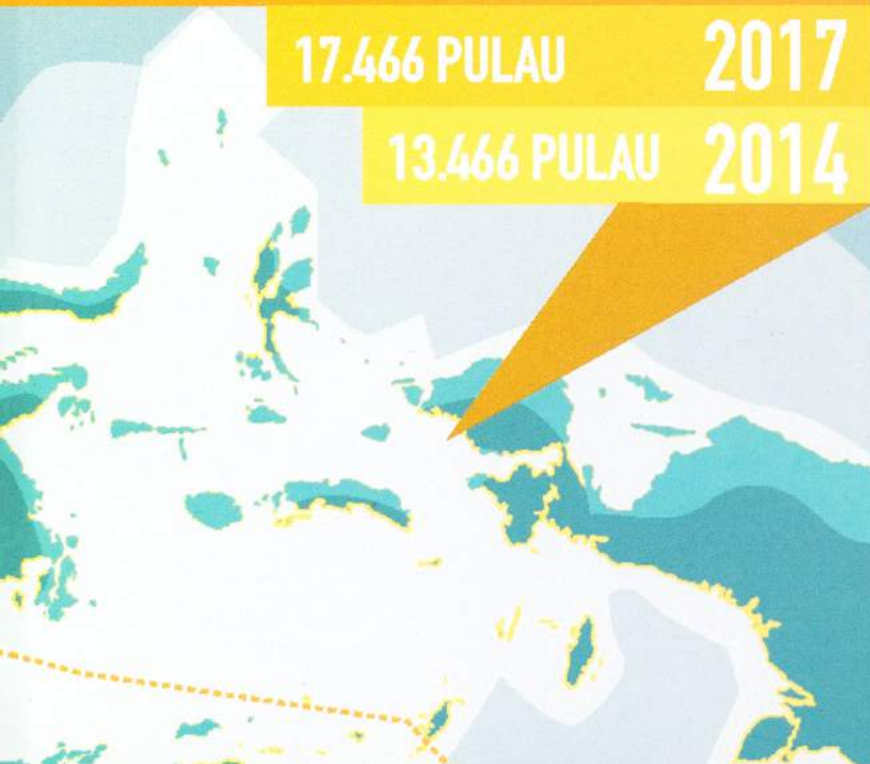
45%
KOMODITAS DAN PRODUK
PERDAGANGAN DUNIA.

1 500 TRILIUN
DOLLAR AS/TAHUN
MELINTASI LUAR LAUT
KEPULAUAN INDONESIA

2017 SELURUH PULAU
TERDAFTAR DI PBB.

17.466 PULAU 2017

13.466 PULAU 2014

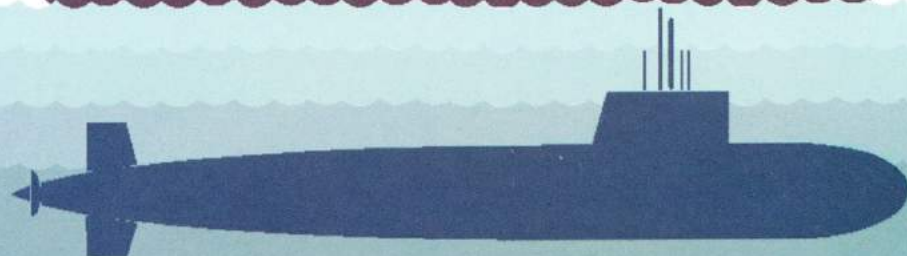


RENTANG

2010

2014

INDONESIA
MENGANGGARKAN
RP150 TRILIUN
UNTUK MEMBANGUN
PERTAHANAN LAUT



2019 BATAS MARITIM NEGARA
AKAN TERSELESAIKAN

467 KAPAL TNI, PATROLI AMANKAN
WILAYAH LAUT INDONESIA.

MEMPERKUAT SISTEM PERTAHANAN INDONESIA



Saat ini, jumlah
personel aktif TNI
476.000
personel



9%
ANGKATAN
UDARA



74%
ANGKATAN
DARAT



17%
ANGKATAN
LAUT

tahun **2015** **Militer Indonesia**
menempati peringkat



12
Dunia



7 Asia
Pasifik



KAPABILITAS DI MATRA DARAT, LAUT, DAN UDARA.
(versi Global Fire Power)

SASARAN



Melanjutkan pemenuhan
kebutuhan Alat Utama
Sistem Persenjataan
(ALUTSISTA)



Meningkatkan
**kesiapan
operasi TNI**



Meningkatkan
**kesejahteraan
prajurit**



Anggaran
pertahanan
1.5% dari PDB
dalam kurun
5 tahun



membangun TNI
sebagai kekuatan
maritim regional
yang disegani di
kawasan Asia Timur

7 PRIORITAS PROGRAM NASIONAL INDUSTRY PERTAHANAN, YAITU:

**PENGEMBANGAN
JET TEMPUR
KF-X/F-X**

**PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN
KAPAL SELAM**

**PEMBANGUNAN
INDUSTRI
PROPELAN/MESIU**

**PENGEMBANGAN
ROKET NASIONAL**

**PENGEMBANGAN
RUDAL NASIONAL**

**PENGEMBANGAN
RADAR NASIONAL**

**PENGEMBANGAN
TANK SEDANG**



MENDAYUNG DI ANTARA DUA KARANG

KONSEP YANG DIGAGAS OLEH WAKIL PRESIDEN PERTAMA INDONESIA, MOH. HATTA, DALAM BERPOLITIK INTERNASIONAL YANG PERLU DIANUT INDONESIA.

Konsep itu bukanlah menjadikan Indonesia memilih jalan tengah antar dua blok yang berpengaruh pada masa itu, tetapi politik internasional yang didasarkan dengan tanpa sentimen dan lebih memperhatikan aspek realitas dan kepentingan nasional Indonesia

WILAYAH NEGARA INDONESIA BERBATASAN LANGSUNG DENGAN 10 NEGARA



DIPLOMASI MARITIM DIPERKUAT AGAR INTEGRITAS DAN KEDAULATAN WILAYAH INDONESIA DI SELURUH PERBATASAN TERJAMIN, SERTA MENDORONG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PULAU PULAU TERDEPAN

POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA AKAN DITITIKBERATKAN PADA:



UPAYA MENGEDEPANKAN IDENTITAS SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN DALAM PELAKSANAAN DIPLOMASI DAN MEMBANGUN KERJA SAMA INTERNASIONAL.



MENGUATKAN DIPLOMASI MIDDLE POWER YANG MENEMPATKAN INDONESIA SEBAGAI KEKUATAN REGIONAL DENGAN KETERLIBATAN GLOBAL SECARA SELEKTIF



MEMPERLUAS MANDALA KETERLIBATAN REGIONAL DI KAWASAN INDO-PASIFIK.



MENINGKATKAN PELIBATAN PERAN, ASPIRASI DAN KEPENTINGAN MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN DAN PELAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI. DAN MENATA INFRASTRUKTUR DIPLOMASI.

MENJAGA PARA PAHLAWAN DEVISA



6.5 juta
tenaga kerja
migran Indonesia
DI LUAR NEGERI,



TERSEBAR DI 176 NEGARA,
PADA 2013 MAMPU MEMBERIKAN DEVISA
SEBESAR US\$ 7.4 MILYAR
(RP. 88 TRILYUN)



70%
adalah
pekerja wanita
yang bekerja di
sektor domestik
(PRT) dan
manufaktur



30%
adalah **pekerja pria**
yang bekerja sebagai
buruh perkebunan,
konstruksi, transportasi
dan jasa.



Malaysia dan Arab Saudi

adalah 2 negara tujuan utama para tenaga migran dari Indonesia.

Sasaran permasalahan pekerja migran yang bekerja ke luar negeri

yang hendak dicapai dalam lima tahun ke depan:



1

Menurunnya jumlah pekerja migran yang menghadapi masalah hukum di dalam dan luar negeri.



2

Terwujudnya mekanisme rekrutmen dan penempatan yang melindungi pekerja migran.



Meningkatnya peran daerah dalam pelayanan informasi pasar kerja dan pelayanan rekrutmen calon pekerja migran

4



Tersedianya regulasi yang memberi jaminan perlindungan hak dan keselamatan bagi pekerja migran.

5

Meningkatnya pekerja migran yang memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pasar

3



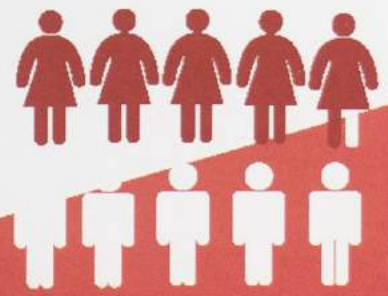


MEMBANGUN TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH

SRIKANDI-SRIKANDI INDONESIA



Jumlah Perempuan
Indonesia
118.010.043 jiwa



49,66%

Dari seluruh penduduk
Indonesia adalah wanita

TINGKAT KETERPILIHAN PEREMPUAN
DI PARLEMEN PADA PEMILU 2014
MASIH DIBAWAH 30%

17,32%
DPR

26,51%
DPD

16,141%
DPRD
PROVINSI

14%
DPRD
KABUPATEN/KOTA

KEBIJAKAN & STRATEGI

1 MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP

dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan



2 MENINGKATKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM POLITIK

termasuk dalam proses pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif



MENTERI WANITA DI CABINET KERJA JOKOWI JK ADALAH **8 MENTERI** **23,5% DARI 34 MENTERI**

3 MENINGKATKAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

TINGKAT KETERWAKILAN PEREMPUAN DI TINGKAT PARLEMEN PUSAT ANTARA DI ASEAN

Filipina	27.2%	Malaysia	10.4%
Singapore	25.3%	Myanmar	6.2%
Laos	25%	Thailand	6.1%
Vietnam	24.3%	Brunei	N/A
Cambodia	20.3%		
Indonesia	17.3%		

JUMLAH PEREMPUAN INDONESIA YANG SANGAT SIGNIFIKAN

memegang peranan penting dalam pembangunan nasional (sensus penduduk 2010)

Menteri Badan Usaha Milik Negara
RINI SOEMARNO

Menteri Sosial
KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Menteri Kelautan dan Perikanan
SUSI PUDJIASTUTI

Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup
SITI NURBAYA

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
YOHANA YEMBISE

Menteri Luar Negeri
RETNO LP MARSUDI

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Kesehatan
NILA F MOELOEK,

DARI GOOD GOVERNANCE MENUJU DEMOCRATIC GOVERNANCE

PADA TAHUN 2011
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
MENYEPAKATI

DECLARATION OF
PRINCIPLES ON
OPEN GOVERNMENT
DAN MELAHIRKAN

OPEN
GOVERNMENT
PARTNERSHIP
(OGP)

yang mendorong pemerintah
agar membuka diri dan membuka
ruangruang partisipasi warga negara
melalui berbagai skema kolaborasi demi
terciptanya transparansi
pemerintahan.

9

PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI :



Penataan Struktur organisasi pemerintahan



Peningkatan Profesionalisme PNS



Peningkatan integritas dan akuntabilitas aparat



Penataan Jumlah dan distribusi PNS



Pengembangan Sistem E-Government



Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri



Pengembangan Sistem Seleksi CPNS dan Promosi Terbuka



Peningkatan pelayanan publik



Peningkatan efisiensi Belanja aparat

SASARAN

TERWUJUDNYA SISTEM PELAPORAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

MENINGKATNYA AKSES PUBLIK TERHADAP INFORMASI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

MAKIN EFEKTIFNYA PENERAPAN E-GOVERNMENT UNTUK Mendukung MANAJEMEN

MENINGKATNYA IMPLEMENTASI OPEN GOVERNMENT PADA SELURUH INSTANSI PEMERINTAH







**MEMBANGUN INDONESIA
DARI PINGGIRAN DENGAN
MEMPERKUAT DAERAH DAERAH
DAN DESA DALAM KERANGKA
NEGARA KESATUAN**

MAKMUR INDONESIA TIMUR

Selama 30 tahun (1983-2013) kontribusi ekonomi Kawasan Barat Indonesia sangat dominan dan tidak pernah berkurang dari 80% terhadap PDB Indonesia. Kini saatnya Indonesia Timur memperkuat kontribusinya dengan pembangunan kawasan.

TARGET PEMERATAAN PEREKONOMIAN ANTARA KAWASAN BARAT INDONESIA DENGAN KAWASAN INDONESIA TIMUR



19 kabupaten tertinggal di Kawasan Barat Indonesia

KESENJANGAN ANTARA KOTA-KOTA KAWASAN BARAT INDONESIA (KBI) DAN KAWASAN TIMUR INDONESIA (KTI)

103 dari 122 kabupaten di Kawasan Timur Indonesia adalah kabupaten tertinggal

26 dari 29 kabupaten di Provinsi PAPUA adalah daerah tertinggal

Akan dibangun 13 kawasan industri baru di wilayah koridor


PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN DI WILAYAH PERTUMBUHAN.




2.650 kilometer jalan arteri
1.000 kilometer jalan tol.



3.258 kilometer jalur kereta api.



24 pelabuhan untuk mendukung tol laut



15 bandara baru dan mengembangkan bandara yang ada,
9 bandara untuk pelayanan kargo udara.

TERWUJUDNYA 39 PUSAT PERTUMBUHAN BARU

mencakup: 27 pusat tersebar di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan 12 pusat tersebar di Kawasan Barat Indonesia (KBI).

ARAH KEBIJAKAN



Percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, di masing-masing pulau di Luar Jawa



Percepatan pembangunan ekonomi nasional berbasis maritim (kelautan)



Upaya peningkatan pembangunan ekonomi di semua pusat pertumbuhan



Peningkatan fungsi dan peran perhubungan laut untuk mewujudkan poros maritim dunia.



Peningkatan kemampuan SDM dan Iptek untuk mendukung pengembangan kluster-kluster industri teknologi

SASARAN



SASARAN PEMBANGUNAN INDONESIA TIMUR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Pulau Papua, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara

TARGET PERTUMBUHAN MINIMAL TERHADAP PDB

Meningkat.

20 % (2014)

22 % (2019)



MENANGGULANGI KEMISKINAN, MENGURANGI KETIMPANGAN

Sekitar 68 juta penduduk Indonesia tetap rentan untuk jatuh miskin.

Pendapatan mereka hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga miskin. Guncangan ekonomi seperti jatuh sakit, bencana atau kehilangan pekerjaan, dengan mudah dapat membuat mereka kembali jatuh miskin.



PADA TAHUN 2014, PERSENTASE JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI INDONESIA MENCAPAI 11,25 % / 28,28 JUTA JIWA

ANGKA KEMISKINAN DITARGETKAN TURUN MENJADI 7 – 8 % PADA 2019

DATA KEMISKINAN

4,5 juta rumah tangga dari berpendapatan 6 juta terendah

Tetap dalam kemiskinan selama 3 tahun lebih



sedangkan 1,5 juta terancam selalu dalam kondisi miskin.

Indonesia hanya menghabiskan 0,7% dari PDB

(Pendapatan Domestik Bruto) untuk program-program bantuan sosial, dibandingkan dengan

Brasil yang menggunakan 1,5% dari PDB

AGAR PEMBANGUNAN DAPAT DINIKMATI OLEH SELURUH LAPISAN MASYARAKAT MAKA:



Meningkatnya investasi padat pekerja



Meningkatnya akses usaha mikro dan kecil untuk mengembangkan keterampilan, pendampingan, modal usaha, dan pengembangan teknologi;

Terbentuknya kemitraan pemerintah, pemerintah daerah dan swasta/ BUMN/ BUMD



Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi yang berkualitas

Meningkatnya penjangkauan pelayanan dasar



Meningkatnya perlindungan sosial, produktivitas dan pemenuhan hak dasar bagi penduduk kurang mampu

MENJEMPUT YANG TERTINGGAL

**92 PULAU
TERDEPAN**

11 pulau
berbatasan
dengan laut lepas

81 pulau

berbatasan langsung
dengan 10 negara
tetangga

Tersebar di **9** provinsi
sebagian besar berada
**di Kepulauan
Riau dan Maluku.**
luas pulau kurang
dari **2000 km²**



Pembangunan perlu dimulai dengan
meletakkan dasar-dasar kebijakan
**DESENTRALISASI ASIMETRIS
(KEBIJAKAN KEBERPIHAKAN)**
kepada daerahdaerah yang
saat ini masih tertinggal.



**DESA SANGAT
TERTINGGAL**

17.268 di **419**
kabupaten/kota
di Indonesia

5.204
di Papua

122
kabupaten
tertinggal

33
di Papua

KEBIJAKAN DESENTRALISASI ASIMETRIS:

(PEMBAGIAN ANGGARAN SESUAI KEBUTUHAN DAERAH)

DAERAH TERTINGGAL
DAN TERPENCIL

DESA TERTINGGAL

KAWASAN PERBATASAN
DAN PULAU-PULAU
TERLUAR

DAERAH-DAERAH YANG KAPASITAS
PEMERINTAHANNYA BELUM CUKUP
MEMADAI DALAM MEMBERIKAN
PELAYANAN PUBLIK

KAWASAN PERBATASAN

Sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan

PENGEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL

mengurangi kesenjangan pembangunan antara daerah tertinggal dengan daerah maju







**MEMPERKUAT KEHADIRAN NEGARA
DALAM MELAKUKAN REFORMASI
SISTEM DALAM PENEGAKAN HUKUM
YANG BEBAS KORUPSI, BERMARTABAT
DAN TERPERCAYA**

MELESTARIKAN ALAM, MELESTARIKAN MASA DEPAN

KONTRIBUSI INDUSTRI PRIMER BERBASIS SUMBER DAYA ALAM DAN INDUSTRI BERBASIS PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN TERHADAP EKONOMI NASIONAL:

INDUSTRI PRIMER
berbasis sumber daya alam

8,8 juta
lapangan kerja

16,6 %
Terhadap PDB nasional

8,6 juta
lapangan kerja

13,7 %
Terhadap PDB nasional

industri berbasis
**PERTANIAN
KEHUTANAN
& PERIKANAN**

**INDONESIA
MENGALAMI
KERUGIAN**

RP 83
MILIAR / HARI

AKIBAT

**PENEBANGAN LIAR
(ILLEGAL LOGGING)**

**PENEBANGAN
KAYU LIAR**



STRATEGI

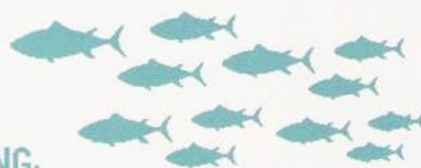
UNTUK MENGURANGI
PENAMBANGAN LIAR:



MENURUNKAN
FREKUENSI DAN
LUASAN
PENEBAHAN LIAR



MENGURANGI
ILLEGAL FISHING:



Peningkatan
instrumen
penegakan
hukum



Penguatan
lembaga
pengawasan
laut



Peningkatan
Koordinasi Dalam
Penanganan
Pelanggaran
Tindak Pidana



Penguatan
sarana sistem
pengawasan
perikanan



Penataan sistem
perijinan usaha
perikanan tangkap



Peningkatan
Penerbitan
Ketaatan Kapal
di Pelabuhan
perikanan yang
dilakukan melalui
pemeriksaan
terhadap



Penyederhanaan proses
Perijinan, Pengawasan
dan Penerbitan kegiatan
pertambangan



Penegakan hukum
pada pelanggaran
kegiatan
pertambangan



Penerapan kegiatan
pertambangan yang
berkelanjutan dan
menjaga kualitas
lingkungan



Pengembangan
masyarakat dan
peningkatan taraf
hidup masyarakat di
sekitar pertambangan



Peningkatan
efektivitas
penegakan
hukum



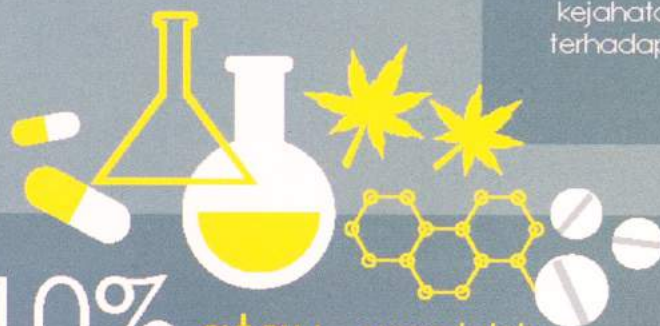
Peningkatan
efektivitas dan
kualitas
pengelolaan
hutan

INDONESIA MELAWAN

NARKOBA



4 Juta
orang
harus diperbaiki
kondisinya
karena penyalahgunaan
narkotika



10% atau
34 dari 356
varian zat baru
narkotika

yang telah
diidentifikasi
dari seluruh dunia.
didapatkan
di Indonesia



Narkoba, terorisme, dan korupsi
digolongkan dalam

EXTRA ORDINARY CRIME (KEJAHATAN LUAR BIASA)

kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan ini.



DI INDONESIA
60% ATAU
27.000
PENGHUNI LAPAS
ADALAH TERKAIT
KEJAHATAN
NARKOTIKA

Hukuman Mati Kasus Narkoba

KEBIJAKAN:

INDONESIA

2000 - 2007

7 dari 27

terpidana mati

Menunggu eksekusi:

72 dari 138 terpidan mati



SINGAPURA

2000-2014 :

59 terpidana mati

(Laporan International Harm Reduction Association)



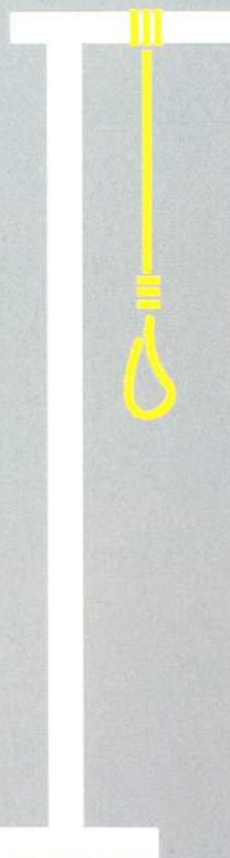
MALAYSIA

1960-2011:

228 dari 441

terpidana mati

(sumber: Malaysia Against Death Penalty and Torture)



Meningkatkan upaya terapi dan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba



Mengintensifkan upaya sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba



Meningkatkan efektifitas pemberantasan, penyalahgunaan

MENGATASI BENALU NEGERI

GLOBAL XCOMPETITIVENESS REPORT

Pada tahun
2014

**107 DARI 175
NEGARA**

Indeks Persepsi
Korupsi Indonesia
ada di peringkat

yang disurvei
Transparansi
International.



menempatkan korupsi dan inefisiensi birokrasi sebagai salah satu dari the most problematic factors dalam berbisnis di Indonesia.



7

Singapura



50

Malaysia



85

Filipina



Thailand



107

Indonesia



Pemerintah Indonesia menandatangani **Konvensi Antikorupsi di Markas Besar PBB, New York, tanggal 18 Desember 2003** dan telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003. Indonesia bisa menggunakan konvensi tersebut sebagai instrument baru dalam rangka asset recovery dari negara2 yg juga meratifikasi konvensi.



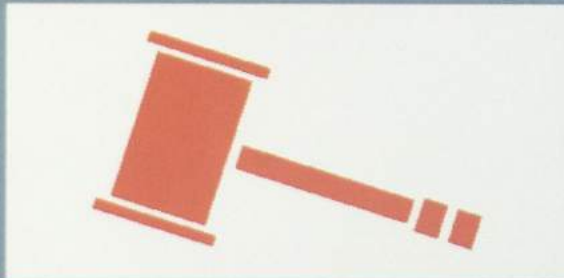
UPAYA UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI



Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Korupsi



Penguatan Kelembagaan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi



Meningkatkan Efektivitas Implementasi Kebijakan Anti-korupsi



Meningkatkan Pencegahan Korupsi

PERLINDUNGAN PADA ANAK & PEREMPUAN



Kelompok marginal

Kelompok Marginal adalah masyarakat terpinggirkan, yang sering tidak dianggap dan tidak didengar, serta tidak memiliki harga diri dan rasa percaya diri. Misalnya anak jalanan, orang dengan HIV dan AIDS, masyarakat tradisional, pemulung, penyandang cacat, korban perdagangan manusia, korban kekerasan domestik atau komunitas, remaja yang mengalami konflik dengan hukum, buruh tani, pekerja seks, transgender, dan lain-lain.

KEKERASAN TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN

BERBAGAI BENTUK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DISEBABKAN OLEH, ANTARA LAIN :



1,1 juta
anak laki-laki
atau 1 dari 13
anak laki-laki



800 RIBU
anak perempuan
atau 1 dari 18
anak perempuan

mengalami kekerasan seksual
ketika usia mereka
belum mencapai 18 tahun



Persepsi
sebagian masyarakat
yang masih tidak adil
terhadap perempuan



Ketidaktahuan masyarakat
mengenai UU Penghapusan
Kekerasan Dalam rumah Tangga
dan UU Perlindungan Anak



Kurangnya
penanganan kekerasan
terhadap perempuan
dan anak yang dapat
menimbulkan efek jera



Masalah ekonomi:
ketergantungan
istri dan anak
pada penghasilan
sehari-hari dari suami.

KEBIJAKAN DAN STRATEGI:

**MEMPERKUAT
PERLINDUNGAN
ANAK DAN PEREMPUAN
DARI BERBAGAI
TINDAK KEKERASAN,**



**MENINGKATKAN KAPASITAS
KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN
ANAK DAN PEREMPUAN DARI
BERBAGAI TINDAK KEKERASAN
DAN PERLAKUAN SALAH LAIN**



KEBIJAKAN UNTUK PERLINDUNGAN KAUM MARJINAL:

**Peningkatan pemahaman
masyarakat marjinal terhadap
hak dan mekanisme dalam
mendapatkan layanan
bantuan hukum**



**Pelibatan Pemerintah
Daerah dalam pelaksanaan
bantuan hukum**



**Penguatan sistem
data dan informasi
untuk kelompok marjinal,
untuk memastikannya
mendapat identitas
hukum**



**Pelaksanaan sosialisasi
dan penguatan institusi
penyeleng-gara
bantuan hukum**



**Optimalisasi pelaksanaan
sidang keliling dan
pemanfaatan dana
prodeo bagi
kelompok marginal
termasuk masyarakat
miskin**





**MENINGKATKAN
KUALITAS HIDUP MANUSIA
DAN MASYARAKAT INDONESIA**

AYO SEKOLAH!



KUALITAS PENDIDIKAN INDONESIA

APS anak usia 7-18 tahun, yaitu pada tahun 2012 sebesar 87,81 % dan tahun 2013 sebesar 88,87 %.

Angka ini menggambarkan bahwa belum semua anak usia sekolah dapat memperoleh haknya untuk mengikuti pendidikan dasar dan menengah, sehingga diperlukan adanya Wajib Belajar 12 Tahun

KARTU INDONESIA PINTAR

sebagai penerima bantuan tunai pendidikan dari mulai SD/MI/ sederajat sampai lulus SMA/SMK/MA/ sederajat



2015

PROGRAM INDONESIA PINTAR

MENINGKATKAN CAKUPAN DARI 11,1 MENJADI

20,3 JUTA ANAK

ARAH KEBIJAKAN PENDIDIKAN



Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun melalui pemenuhan hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar dan pemenuhan akses pendidikan menengah berkualitas

Meningkatkan kualitas pembelajaran, melalui penguatan jaminan kualitas (quality assurance) pelayanan pendidikan; penguatan kurikulum dan pelaksanaannya; dan penguatan system penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel

Meningkatkan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan

Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan

Meningkatkan pemerataan akses, peningkatan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan tinggi

Meningkatnya partisipasi pendidikan dasar dan menengah

Menurunnya angka putus sekolah dan meningkatnya angka melanjutkan

Menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok masyarakat, dan antardaerah

Meningkatnya kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi

Meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan

Meningkatnya kualitas pengelolaan guru, dan jaminan hidup bagi guru yang ditugaskan di daerah khusus

Meningkatnya dan meratanya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal

MENINGKATKAN KESEHATAN, MENJAGA MASA DEPAN

MASALAH- MASALAH KESEHATAN DI INDONESIA

PREVALEN SISTUNTIN
PADA ANAK BALITA
DI INDONESIA

37.2%.

Menurut standar WHO,
prevalensi ini dikategorikan
sebagai MASALAH KES
KESEHATAN MASYARAKAT

STUNTING

Stunting pada anak balita
adalah keadaan dimana
tinggi badan anak balita
dibandingkan umumnya
berada dibawah standar
internasional yang berlaku.

TINGGI ANAK
INDONESIA
USIA 5 TAHUN

2010



LEBIH RENDAH
6,7 CM

LEBIH RENDAH
7,3 CM

DARI TINGGI SEHARUSNYA

ANGKA PERNIKAHAN DINI
MASIH CUKUP TINGGI



Perilaku seks berisiko serta HIV/AIDS
khususnya pada kelompok usia produktif.



ANGKA KEMATIAN IBU
YG CUKUP TINGGI

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA DARI TAHUN KE TAHUN MENINGKAT

WALAUPUN SAAT INI
INDONESIA RANKING



108 DARI 187
NEGARA DI DUNIA

PENGUATAN LAYANAN KESEHATAN 2015-2019



KESIAPAN 6.000 PUSKESMAS
RAWAT INAP
DAN NON RAWAT INAP



TERBENTUKNYA 14 RS
RUJUKAN NASIONAL



TERBENTUKNYA 125 RS
RUJUKAN REGIONAL

SASARAN



Meningkatnya status
kehatan ibu dan anak



Meningkatnya
status gizi
masyarakat



Meningkatnya
pengendalian
penyakit dan
penyehatan
lingkungan



Meningkatnya
pemerataan
akses dan mutu
pelayanan kesehatan



Meningkatnya
perlindungan
finansial



Meningkatnya
ketersediaan,
penyebaran dan mutu
SDM kesehatan



Memastikan ketersediaan
obat dan mutu obat
dan makanan

MENANGGULANGI KEMISKINAN, MENGURANGI KETIMPANGAN

Sekitar 68 juta penduduk Indonesia tetap rentan untuk jatuh miskin.

Pendapatan mereka hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga miskin. Guncangan ekonomi seperti jatuh sakit, bencana atau kehilangan pekerjaan, dengan mudah dapat membuat mereka kembali jatuh miskin.

DATA KEMISKINAN

4,5 juta rumah tangga dari berpendapatan 6 juta terendah

Tetap dalam kemiskinan selama 3 tahun lebih



sedangkan 1,5 juta terancam selalu dalam kondisi miskin.



PADA TAHUN 2014, PERSENTASE JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI INDONESIA MENCAPAI 11,25 % / 28,28 JUTA JIWA

ANGKA KEMISKINAN DITARGETKAN TURUN MENJADI 7 – 8 % PADA 2019

Indonesia hanya menghabiskan 0,7% dari PDB (Pendapatan Domestik Bruto) untuk program-program bantuan sosial, dibandingkan dengan Brasil yang menggunakan 1,5% dari PDB

AGAR PEMBANGUNAN DAPAT DINIKMATI OLEH SELURUH LAPISAN MASYARAKAT MAKA:



Meningkatnya investasi padat pekerja



Meningkatnya akses usaha mikro dan kecil untuk mengembangkan keterampilan, pendampingan, modal usaha, dan pengembangan teknologi;

Terbentuknya kemitraan pemerintah, pemerintah daerah dan swasta/ BUMN/BUMD



Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi yang berkualitas

Meningkatnya penjangkauan pelayanan dasar



Meningkatnya perlindungan sosial, produktivitas dan pemenuhan hak dasar bagi penduduk kurang mampu

PERLINDUNGAN HAK PETANI

DISTRIBUSI HAK ATAS TANAH PETANI



1 JUTA HEKTAR
REFORMASI AGRARIA TANAH HAK
TERMASUK HGU, TANAH TERLANTAR DAN
TANAH TRANSMIGRASI

4.1 JUTA HEKTAR
REFORMASI AGRARIA
KAWASAN HUTAN YANG
AKAN DILEPASKAN:

2019



3.9
JUTA
HEKTAR

REFORMASI AGRARIA TANAH MILIK MASYARAKAT
DENGAN KRITERIA PENERIMA REFORMA AGRARIA

2019

9 JUTA HA

SASARAN PENGELOLAAN ASET TANAH:

2015

100.000 HA

KEBIJAKAN

REDISTRIBUSI TANAH

SERTIFIKASI TANAH

BANTUAN UNTUK PETANI, NELAYAN, UKM
DAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

INDONESIA YANG PRODUKTIF

Pada tahun **2025** ledakan penduduk akan terjadi

perkiraan populasi
284,8 juta

Naik sekitar 29 juta jiwa dari tahun 2015



Bonus Demografi Indonesia

Jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) mencapai 193,5 juta jiwa*, hampir separuh populasi Indonesia, dan akan terus meningkat s.d. tahun 2025. Kebijakan sumber daya manusia, kependudukan, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, infrastruktur dan sumber daya alam serta politik hukum dan keamanan harus diarahkan dengan tepat untuk meraih bonus demografi

*) tahun 2025

ANCAMAN KEPENDUDUKAN



meningkatkan tekanan pada kebutuhan pangan dan energy serta kelestarian dan kualitas lingkungan.



Pertumbuhan penduduk lanjut usia (population ageing) memerlukan jaminan perlindungan sosial, perlindungan hari tua dan pelayanan penyakit ketuaan dan degeneratif.

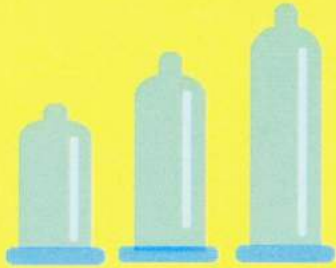


Urbankasi dan migrasi menuntut ketersediaan infrastruktur perkotaan yang memadai dan pada saat yang sama berpotensi memunculkan konflik sosial, pengangguran dan kriminalitas.



Tingginya kepadatan penduduk juga berpotensi meningkatkan polusi dan penyebaran berbagai penyakit menular

SASARAN



Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi



Menurunnya angka kelahiran pada remaja kelompok usia 15-19 tahun



Meningkatnya pengetahuan program kependudukan dan Keluarga Berencana



Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman pasangan usia subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern minimal



Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang isu kependudukan



Meningkatnya pemahaman dan kesadaran orangtua, remaja an/atau anggota keluarga tentang fungsi keluarga





**MENINGKATKAN
PRODUKTIFITAS RAKYAT
DAN DAYA SAING
DI PASAR INTERNASIONAL**

MEMBANGUN KONEKTIVITAS, MEMERATAKAN PEMBANGUNAN

Untuk Mendukung
Program TOL LAUT

5 Tahun
ke depan

Pembangunan

24
PELABUHAN

Pembelian

609
KAPAL

TOL LAUT adalah penyelenggaraan angkutan laut secara tetap dan teratur yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan hub disertai *feeder* dari Sumatera hingga ke Papua dengan menggunakan kapal-kapal berukuran besar.

UDARA

Pembangunan
15 bandara baru

Meningkatnya jumlah penumpang yang diangkut maskapai penerbangan nasional menjadi

162 juta
/penumpang/tahun

Pengembangan
9 bandara untuk pelayanan kargo udara

Peningkatan
On-time Performance

95%

DARAT

MENINGKATNYA JUMLAH BARANG YANG DAPAT diangkut oleh kereta api menjadi **1,5 juta TEUs/Tahun**

MENURUNNYA RASIO ANGKA KECELAKAAN KERETA API MENJADI KURANG DARI 0,025 KECELAKAAN PER 1 JUTA-KM PERJALANAN KA.

Kereta api & pembangunan jalan

peningkatan kapasitas jalan **4.200 lajur-km**

pembangunan jalur
KA 4.471 KM

Pembangunan jalan baru sepanjang **2.650 km**

pengembangan jaringan jalan (termasuk jalan tol) sepanjang **6.000 km**

Pembangunan jalan tol sepanjang **1.000 km**

Perbaikan jalan sepanjang **45.592 km** di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, Maluku dan Papua

LAUT

Pelayaran

Pembangunan dan pengembangan **163 Pelabuhan non komersial** sebagai *sub feeder* tol laut

Terbangunnya **50 kapal perintis**

pengembangan **65 pelabuhan penyeberangan**

Terlayannya **193 lintas angkutan laut perintis**

MEMBANGUN TRANSPORTASI UMUM, MENGURAI KEMACETAN

Pada Feb 2015, dalam survey yang dilakukan di kota-kota di seluruh dunia, **Jakarta dinyatakan sebagai kota paling macet di dunia.** Pengemudi mobil di Jakarta berhenti dan melajukan lagi mobil mereka sebanyak 33.240 kali per tahun di jalan.

Pertumbuhan jumlah kendaraan yang tinggi didominasi oleh kendaraan pribadi. Jika 50% pengguna kendaraan pribadi beralih ke kendaraan umum, permasalahan kemacetan ini dapat dihindarkan. Secara teknis, **peningkatan penggunaan angkutan umum dapat menjadi solusi kunci permasalahan kemacetan.**

Jumlah kendaraan
di Indonesia sebanyak
104.118.969

80%
SEPEDA
MOTOR

11%
MOBIL

5%
TRUK

2%
BIS



RENCANA SASARAN 5 TAHUN KEDEPAN

Pembangunan angkutan massal cepat berbasis rel antara lain MRT di wilayah Jabodetabek, dan jalur lingkar layang KA Jabodetabek, serta LRT/monorail/Tram di Surabaya, Bandung, dan Palembang



01

Pangsa pasar angkutan umum perkotaan di Kota Megapolitan/Metropolitan/Besar minimal 32 persen



02

Pengembangan BRT (Angkutan perkotaan berbasis BUS) di 34 kota besar.



03

Pengembangan kereta perkotaan di 10 kota metropolitan: Batam, Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Makassar.



04

HUNIAN UNTUK RAKYAT

5 >
tahun
ke depan

Pemerintah akan membangun
2.250.000 
dan akan **meningkat** menjadi
5 juta rumah pada 2019

Bagi kalangan **masyarakat menengah ke bawah** menggunakan skema **Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)**

**MENURUT DATA BPS,
INDONESIA MENGALAMI
KEKURANGAN
PASOKAN
RUMAH YANG
MENCAPAI**

**15 JUTA
UNIT**

DATA LAYANAN PERUMAHAN

- **900.000**
penyediaan rumah
umum untuk 900.000
Rumah tangga (RT)



- **450.000**
penyediaan KPR swadaya
untuk 450.000 RT

- **550.000**
penyediaan rumah
susun sewa untuk
550.000 RT



- **250.000**
pembangunan baru
rumah swadaya
untuk 250.000 RT



- **50.000**
pembangunan rumah
khusus di daerah
perbatasan, pasca
bencana, dan pasca
konflik untuk 50.000 RT

- **1,5 juta**
Peningkatan
kualitas rumah
tidak layak
huni untuk 1,5
juta RT

LAYANAN KETENAGALISTRIKAN

Meningkatnya jangkauan
layanan ketenagalistrikan
96,61%.

Terlaksananya percepatan
pembangunan tambahan
pembangkit listrik baru
sebesar **35,9 GW.**

Rasio elektrifikasi desa
berlistrik **100%** melalui
pemanfaatan energi baru
terbarukan (EBT), pembangkit
diesel (PLTD) dan gas bumi.

LAYANAN AIR MINUM DAN SANITASI

● Tercapainya **100
persen** pelayanan air
minum pada 2019.

● Tercapainya **100
persen** pelayanan
sanitasi pada 2019.



BUMN SEBAGAI AGEN PEMBANGUNAN

BUMN mendapat **suntikan modal** dari pemerintah sebesar **Rp64,8 triliun**, **terbesar dalam sejarah** suntikan modal BUMN untuk satu tahun anggaran.



REFORMASI BUMN



Menjaga BUMN dari
intervensi politik;



Meningkatkan dan
mempertahankan
profesionalisme pada
jajaran pengelola
BUMN;



Menata pembagian
kewenangan dan
tanggungjawab antara
regulator dan operator
kewajiban pelayanan
publik/PSO



Mendorong BUMN
menjadi perusahaan
kelas dunia

Mendorong gerakan
anti-fraud

NILAI ASSET BUMN

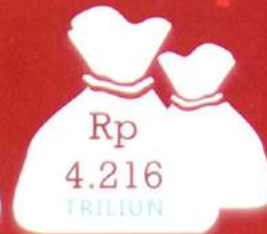
Selama kurun waktu 2009
sampai dengan 2013, nilai aset
138 BUMN meningkat 88%
dari Rp2.505 triliun pada tahun
2009 menjadi Rp4.216 triliun
pada tahun 2013.

MENINGKAT
88%

2009



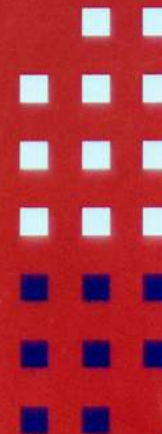
2013



PROYEKSI KONTRIBUSI BUMN

Kontribusi BUMN terhadap
penerimaan negara (dividen+pajak)

2015
2016
2017
2018
2019



Pada tahun 2015,
ditargetkan ada 11
BUMN yang masuk
dalam daftar 2000
perusahaan terbesar
dunia versi Forbes, dan
akan naik menjadi 19
BUMN pada 2019

■ 2015
■ + ■ 2019

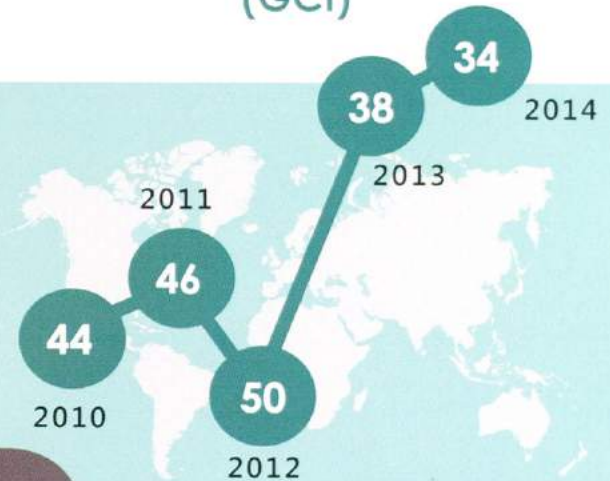
BERSAING

DI PASAR GLOBAL

Daya saing Indonesia di pasar global naik ranking Indeks Kompetitif Global (GCI) dari peringkat ke-38 menjadi peringkat ke-34 dari 144 negara. Salah satu elemen penilaiannya adalah efisiensi tenaga kerja.

PERINGKAT 38  PERINGKAT 34 DARI 144

RANGKING INDONESIA PADA INDEKS KOMPETITIF GLOBAL (GCI)



7 SEKTOR DIBUKA

Dibukanya 7 (tujuh) sektor industri/ perdagangan, diantaranya produk berbasis pertanian, elektronik, perikanan, produk berbasis karet, tekstil, otomotif, dan produk berbasis kayu



PEKERJA FORMAL



40,5% ↑ 51%

Jumlah pekerja formal naik dari 40,5% di tahun 2014 menjadi 51% di tahun 2019

KINERJA LEMBAGA PELATIHAN



Menaikan kinerja lembaga pelatihan pemerintah berbasis kopetensi dari 5% menjadi 25%

PENINGKATAN KUALITAS DAN KETERAMPILAN PEKERJA



Meningkatkan kualitas dan keterampilan pekerja dengan diadakannya pelatihan dan sertifikasi untuk pekerja berkeahlian tinggi dan keahlian menengah.

JUMLAH SERTIFIKASI



576.887 sertifikasi di tahun 2011-2014 menjadi 863.819 sertifikasi di tahun 2015-2019

JUMLAH PELATIHAN



JUMLAH TENAGA KERJA KEAHLIAN MENENGAH

Jumlah tenaga kerja keahlian menengah naik menjadi 42% di tahun 2019

PENGUATAN INVESTASI UNTUK PENGUATAN EKONOMI

Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PTSP

Pada tahun 2014, peringkat Indonesia dalam hal kemudahan dalam berbisnis naik 8 peringkat dari tahun 2013, yakni dari peringkat ke-128 menjadi peringkat ke-120. Pada tahun 2015, peringkat Indonesia naik lagi ke peringkat ke-114 dari 189 negara.



PERINGKAT INDONESIA DALAM EASE OF DOING BUSINESS (EODB)

TAHUN 2011-2015



114

2015

120

2014

128

2013

129

2012

121

2011



SASARAN

Pemrosesan **perizinan maksimal**
15 hari per jenis perizinan
investasi nasional

OK = 7 + 5

Kemudahan dalam prosedur
memulai usaha hanya dengan
7 hari dan 5 prosedur

Meningkatnya **investasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam negeri** menjadi **Rp933 triliun** pada tahun **2019** dengan **kontribusi PMDN** yang **meningkat** menjadi **38,9%**.

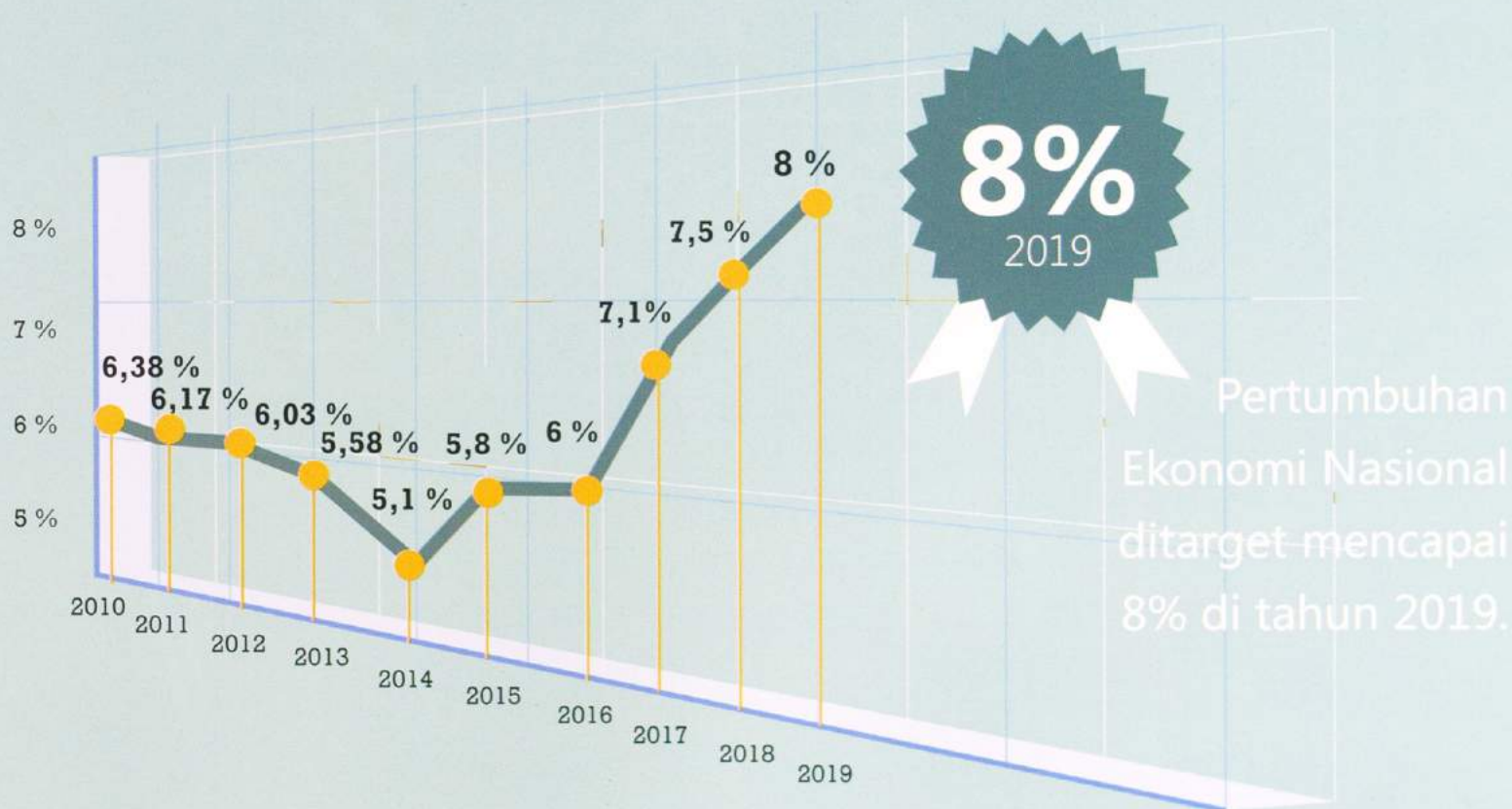
INVESTASI PMA dan PMDN

Tahun 2019
Rp933
triliun

Tahun 2014
Rp519,5
triliun



MENAMBAH LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI





AKSELERASI PERTUMBUHAN EKONOMI DAPAT DICAPAI MELALUI



Peningkatan agroindustri, hasil hutan dan kayu, perikanan, dan hasil tambang.



Akselerasi pertumbuhan industri manufaktur;



Akselerasi pertumbuhan pariwisata;



Akselerasi pertumbuhan ekonomi kreatif;

Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi.

SISI PENGELUARAN DAN SISI PRODUKSI

- Investasi ditarget 10,4% pada tahun 2017, dan 12,1% pada tahun 2019;
- Ekspor diperkirakan tumbuh 8,8% pada tahun 2017, dan mencapai 12,2% pada tahun 2019;
- Konsumsi masyarakat dan konsumsi pemerintah mencapai 6,1% dan 2,5% pada tahun 2019.



7,4 persen



4,5 persen



13,4 persen

- Industri pengolahan dalam lima tahun diperkirakan tumbuh rata-rata sebesar 7,4% per tahun;
- Industri pertanian, kehutanan dan perikanan ditarget tumbuh 4,5%;
- Industri tersier pun mengalami kenaikan dengan pertumbuhan tertinggi pada industri informasi dan komunikasi yang mencapai 13,4% pada tahun 2019, ditopang oleh membaiknya infrastruktur dan meningkatnya pemakaian alat telekomunikasi.





**MEWUJUDKAN
KEMANDIRIAN EKONOMI
DENGAN MENGGERAKAN
SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS**



MENGGENGAM HARAPAN DARI LAUTAN

Pengembangan **Tol Laut** untuk **mendukung konektivitas** dan **sistem logistik** dan **meningkatkan aksesibilitas** dengan **pusat-pusat pengembangan ekonomi regional** dan **nasional** serta **mengembangkan jalur lalu lintas antarsamudera**

TOL LAUT UNTUK MENINGKATKAN KONEKTIVITAS NASIONAL

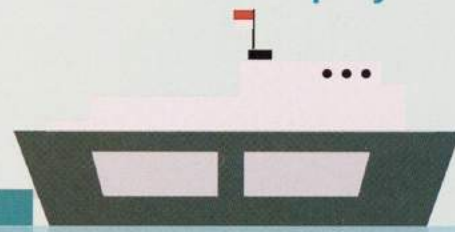
Mengembangkan jalur lalu lintas antarsamudera, seperti jalur **Singapura-Biak** dan **Laut Cina Selatan-Australia**.

Pengembangan, **24** pelabuhan

termasuk **hub internasional** dan **60** dermaga penyeberangan

Menambah **kapal perintis** dan **kapal penyeberangan**

Mengembangkan **industri galangan kapal** kayu dan fiber glass



PENINGKATAN KESEJAHTERAAN NELAYAN DAN WILAYAH PESISIR

Peningkatan **produksi kelautan** dan perikanan sebesar **40-50 juta ton** pada 2019

Pengembangan **wisata bahari** dan **pulau-pulau kecil**

Penambahan **luasan kawasan konservasi laut**.

Pengembangan **energi laut**.

Pemulihan **kawasan pesisir yang rusak**.

Pemenuhan **kebutuhan infrastruktur dasar**

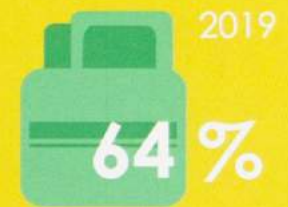
Membangun **24** pelabuhan **perikanan**

MEMPERKUAT KETAHANAN ENERGI NASIONAL



4.03
miliar barrel

Cadangan minyak Indonesia tinggal sekitar 4.03 miliar barrel, hanya cukup untuk 23 tahun lagi tanpa ada penemuan ladang baru.



Penggunaan gas alam dalam negeri naik dari 53% pada tahun 2014 menjadi 64% pada 2019



Pemakaian batubara naik dari 24% pada 2014 menjadi 60% pada tahun 2019.

SASARAN UTAMA PENGUATAN KETAHANAN ENERGI

Menguatnya ketersediaan energi primer dari produksi minyak bumi yang didukung oleh produksi gas bumi dan batubara.

Meningkatnya pemanfaatan sumber energi primer untuk penggunaan di dalam negeri.

Terpenuhinya rasio elektrifikasi mencapai 96,6 persen.

Penyediaan sarana dan prasarana energy.

Pemanfaatan bahan bakar nabati.

Peningkatan bauran energi baru dan terbarukan.

Pengurangan subsidi energi.

PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA ENERGI

Pembangunan kilang minyak sebanyak 1 unit dengan total kapasitas 300 ribu barel per hari.

Penambahan kapasitas penyimpanan BBM sebesar 2,7 juta KL dan LPG sebesar 42 ribu ton

Pembangunan Floating Storage Regasification Unit (FSRU)/ Regasification Unit/LNG Terminal.

Pembangunan pipa gas 6.362 km;

Pembangunan SPBG sebanyak 118 unit.

Kapasitas terpasang pembangkit listrik sebesar 86,6 GW.

PRODUKSI

Produksi minyak diprediksi turun dari 818 ribu barel per hari di 2014 menjadi 700 ribu barel per hari di 2019

Peningkatan produksi gas bumi dari tahun 2014 sebesar 1,22 juta setara barel minyak (SBM) per hari menjadi 1,29 juta SBM per hari pada 2019.

Pengendalian produksi batubara dari 421 juta ton di 2014 menjadi 400 juta ton di 2019.

6.362 km
Pipa Gas

86,6 GW
Pembangkit
Listrik

SPBG
118 unit

82
juta ton

18,4
juta ton

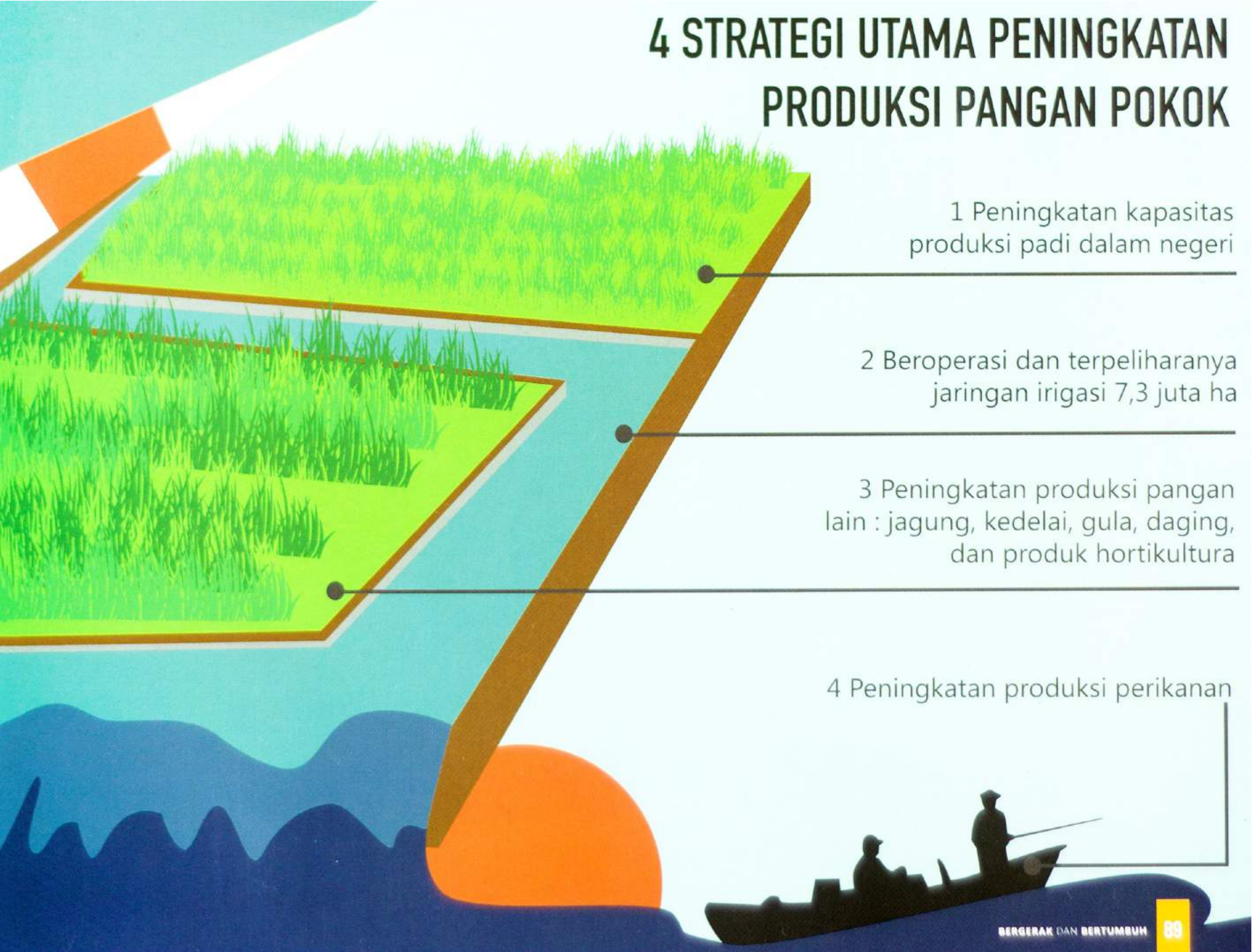
Perkiraan Kementan terhadap surplus neraca beras nasional pada periode 2015-2019

Target Produksi padi 2019 dari 70,6 juta ton pada 2014.

**BERDAULAT PANGAN
DI NEGERI AGRARIS**

Pada tahun 2017, Indonesia diharapkan bisa mencapai swasembada padi.

4 STRATEGI UTAMA PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN POKOK



1 Peningkatan kapasitas produksi padi dalam negeri

2 Beroperasi dan terpeliharanya jaringan irigasi 7,3 juta ha

3 Peningkatan produksi pangan lain : jagung, kedelai, gula, daging, dan produk hortikultura

4 Peningkatan produksi perikanan

MENJAGA KETERSEDIAAN AIR

Menyimpan air baik alami maupun yang tersimpan dalam bangunan penampung air.

Optimalisasi penampung air untuk :

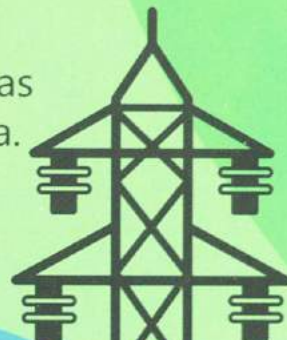


Meningkatkan kapasitas tampung air per kapita.



3 miliar meter kubik

Pembangunan tampungan air



Penyediaan energi terbarukan untuk PLTA.



Pengendalian banjir.

Target :

5.5 juta
hectare

Lahan kritis DAS direhabilitasi



Membangun embung
dan **49** waduk

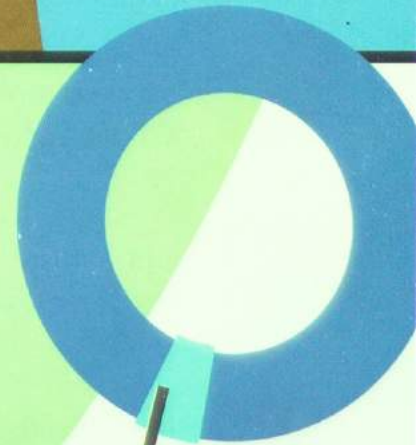
2014 :

Kapasitas tampung air

Sama dengan

3%

58.6
m³/kapita



Dari kebutuhan ideal sebesar 1.975 m³/kapita

NYAMAN BERDAMPINGAN DENGAN ALAM

Melestarikan serta memanfaatkan SDA dan kekayaan hayati serta perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk mengamankan kelangsungan pembangunan bangsa dan negara

Menurunkan risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana

Konservasi & Tata Kelola Hutan



Meningkatnya populasi 25 spesies satwa terancam punah (sesuai *red list of threatened IUCN*) sebesar **10%**



Peningkatan kemitraan dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan



Optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi seluas **20,63 juta ha**



Penyelesaian tata batas kawasan dan tata batas fungsi sepanjang **40.000 km**



Menurunnya jumlah hot spots kebakaran hutan





Hutan Indonesia merupakan salah satu paru-paru dunia yang juga memiliki keragaman hayati flora dan fauna tertinggi di dunia

Luas kawasan hutan berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) s/d tahun 1991.

143,97
juta hektar

Luas kawasan hutan hasil paduserasi TGHK-RTRWP tahun 1999.

120,35
juta hektar

Pengurangan Resiko Bencana



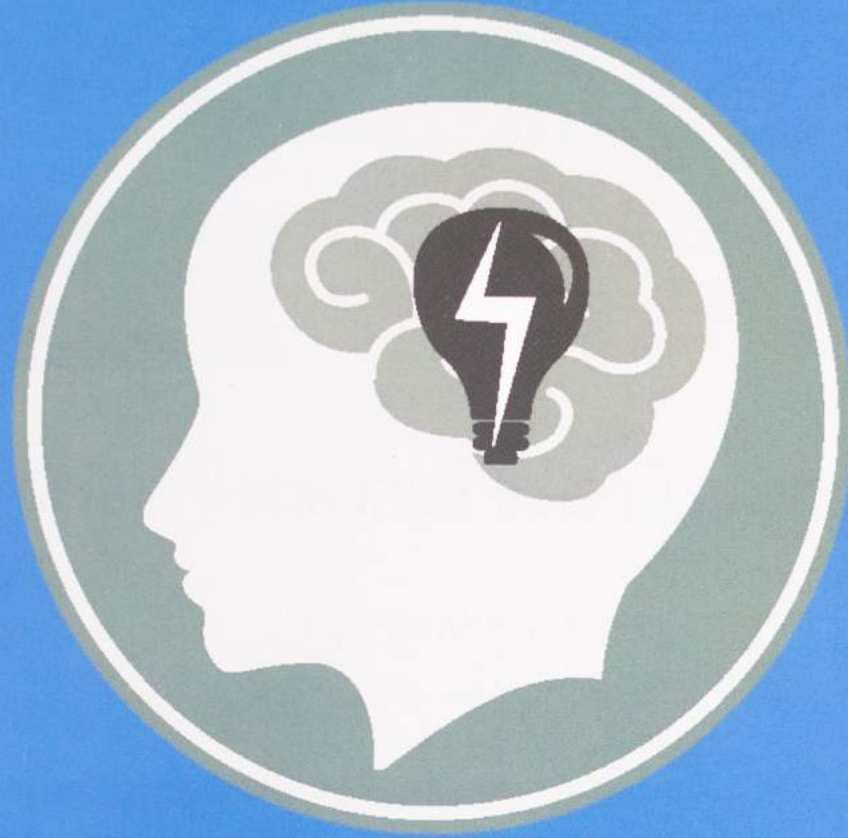
Internalisasi pengurangan risiko bencana



Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana



Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana





**MELAKUKAN REVOLUSI
KARAKTER BANGSA.**

REVOLUSI MENTAL

Membentuk mindset masyarakat yang optimis dan bernasionalisme melalui pendidikan yang berkualitas dan merata, disertai dengan komitmen pemerintah yang kuat.



"Agar perubahan benar-benar bermakna dan berkesinambungan, dan sesuai dengan cita-cita Proklamasi Indonesia yang merdeka, adil, dan makmur, kita perlu melakukan revolusi mental"
(Ir. Joko Widodo – Presiden RI)



Revolusi mental adalah transformasi Etos, perubahan mendasar dalam mentalitas, cara berpikir, cara merasa dan cara mempercayai, yang direfleksikan dalam perilaku dan tindakan sehari-hari, yang menyangkut semua bidang kehidupan, sehingga mentalitas bangsa lambat-laun berubah.



SASARAN



Meningkatnya kualitas pendidikan karakter



Meningkatnya pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya



Meningkatnya budaya dan aktivitas riset dan pengembangan



Meningkatnya budaya produksi, bukan budaya konsumsi



Meningkatnya wawasan kebangsaan di kalangan anak usia sekolah



Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah



Meningkatnya kualitas lulusan-lulusan perguruan tinggi



Meningkatnya budaya inovasi

SUMBER DATA

JUDUL	DATA	SUMBER
BAB 1 KONDISI UMUM DAN LINGKUNGAN STRATEGIS		
3 Masalah Pokok Bangsa		
Kerangka Ekonomi Membangun Negeri		
	Investasi	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta: Bappenas. Hal. 4-15
	Ekspor Impor	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta: Bappenas. Hal. 4-18
	PDB Perkapita	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta: Bappenas. Hal. 4-15
Membangun Ekonomi Negeri yang Mandiri	Pada tahun 2019, penerimaan pajak ditargetkan mencapai Rp. 250 triliun	
	Meningkatnya penerimaan Perpajakan 16 % dari PDB Indonesia.	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta: Bappenas. Hal. 6-183
	Naik dari Rp. 981 T pada 2014 (11% dari PDB)	
	Saat ini, Indonesia adalah Negara dengan Debt-to-GDP ratio terendah (terbaik) di ASEAN yakni 25.9 %	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta: Bappenas. Hal. 4-16
	Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2020 di sektor keuangan, diupayakan kebijakan penguatan sektor keuangan (termasuk perbankan) di bidang permodalan, aset, likuiditas dan strategi keuangan.	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta: Bappenas. Hal. 6-181
	Azas perlakuan yang sama kepada bank asing (resiprokal) di lingkungan ASEAN perlu diupayakan, antara lain melalui pembentukan kelompok bank pilihan diantara negara anggota ASEAN (ASEAN Qualified Banks).	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta: Bappenas. Hal. 6-181
	Sasaran Sektor Keuangan:	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta: Bappenas. Hal. 6-180
	Sasaran Penguatan Kapasitas Fiskal Negara: 16% Pajak terhadap PDB; 3,9% Belanja modal terhadap PDB	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta: Bappenas. Hal. 6-182 & 6-183
	Rasio utang terhadap PDB pada 2019 → 20 %	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta: Bappenas. Hal. 6-183
Lingkungan Strategis (Tantangan Sekaligus Kesempatan bagi Indonesia)	Penduduk usia produktif pada 2015-2019 (>67%)	Bappenas

JUDUL	DATA	SUMBER
BAB 2 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		
Menuju Indonesia Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian	7 Misi Pembangunan Nasional:	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta: Bappenas. Hal. 5-1
	Menuju Indonesia Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian	BAPPENAS
Rancangan Pembangunan Berkelanjutan	Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Karena itu dibutuhkan output cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta: Bappenas. Hal. 5-3 & 5-4
	Pembangunan manusia dan masyarakat.	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta: Bappenas. Hal. 5-2
	Pembangunan sektor unggulan dengan prioritas.	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta: Bappenas. Hal. 5-3
	Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta: Bappenas. Hal. 5-3
Nawacita (Gagasan besar untuk Indonesia)	Nawa Cita (Program Prioritas):	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta: Bappenas. Hal. 5-4 & 5-5
	Point 2 nawacita: Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.	Jalan Perubahan Untuk Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian. Diakses tanggal 1 April 2015. http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_Jokowi-JK.pdf Hal. 7 & 8
	Point 4 nawacita: Mempertkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.	
	Konsep Nawa Cita berpedoman dan merupakan perpanjangan dari Trisakti Soekarno, yang berbunyi: "berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan"	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta: Bappenas. Hal. 1-2 & 1-3
BAB 3 AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL		
Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa Dan Memberikan Rasa Aman Pada Seluruh Warga Negara		
Mengembalikan Jatidiri Indonesia sebagai Negara Maritim		
Memperkuat Sistem Pertahanan Indonesia		
		Sumber : Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku II</i> . Jakarta: Bappenas Hal 6-4 Sumber : Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku II</i> . Jakarta: Bappenas Hal 6-7
	Peringkat ke 12 dunia dan peringkat ke 7 se-Asia Pasifik tahun 2015.	Global Fire Power. (2015) Indonesia Military Strength. Diakses tanggal 31 Maret 2015 Pukul 20.33 PM dari http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=indonesia
	5 sasaran peningkatan kapasitas pertahanan nasional	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta: Bappenas Hal 6-3

JUDUL	DATA	SUMBER
Mendayung diantara Dua Karang	Konsep Mendayung Diantara Dua Karang	Kementerian Luar Negeri. (2014). Berjasa dalam Diplomasi RI, Mohammad Hatta mendapatkan Anugerah Pahlawan Nasional Diplomasi. Diakses pada 1 April 2015 Pukul 11.40 WIB dari http://www.kemlu.go.id/_layouts/mobile/PortalDetail-NewsLike.aspx?l=id&Itemid=31862622-4805-4da8-8b1e-e8f2f63c7f0f
	10 Negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku II</i> . Jakarta: Bappenas Hal 5-26
	4 Poin penitik beratan politik luar negeri Indonesia	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku II</i> . Jakarta: Bappenas Hal 5-24 - 5.25
Menjaga Para Pahlawan Devisa	6,5 Juta Tenaga Kerja Indonesia Tersebar di 176 Negara	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. (2013). Jatim Adakan Peringatan Hari Buruh Migran Internasional Tahun 2013. Diakses pada 1 April 2015 Pukul 11.30 WIB dari http://disnakertransduk.jatimprov.go.id/disnaker-lama/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=37&Itemid=174&limitstart=50
	Sumbangan Devisa sebesar US\$ 7.4 milyar (atau sekitar Rp. 88 trilyun)	Enciety.co. (2014). TKI Sumbang Devisa Negara Rp 88,6 T. Diakses pada 1 April 2015 Pukul 11.30 WIB dari http://www.enciety.co/tki-sumbang-devisa-negara-rp-886-t/
	70% pekerja wanita	Migrant Care. Profil. Diakses pada 1 April 2015 Pukul 11.27 WIB dari http://migrantcare.net/profil/
	30% pekerja pria	Migrant Care. Profil. Diakses pada 1 April 2015 Pukul 11.27 WIB dari http://migrantcare.net/profil/
	5 Sasaran permasalahan pekerja migran yang bekerja keluar negeri	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta: Bappenas Hal 6-6
Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih		
Srikandi-Srikandi Indonesia	Jumlah perempuan	BPS. (2010). Jenis Kelamin Penduduk. Diakses pada 1 April 2015 Pukul 11.32 WIB dari http://sp2010.bps.go.id/
	Rasio perempuan	BPS. (2010). Jenis Kelamin Penduduk. Diakses pada 1 April 2015 Pukul 11.33 dari http://sp2010.bps.go.id/
	Tingkat Keterwakilan Perempuan di Parlemen pada pemilu 2014	DPR. (2014). <i>Info Singkat VI-10-II-P3DI-April-2014-11</i> . Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI Hal 9-12
	Arah Kebijakan Dan Strategi	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta: Bappenas Hal 6-20 - 6-21
	Tingkat keterwakilan perempuan di 10 Negara ASEAN	Women In National Parliaments. World Classification. Diakses pada 1 April 2015 Pukul 10.51 WIB dari http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm
	Menteri wanita kabinet Jokowi JK	Kementerian Dalam Negeri. (2014). Daftar Lengkap Menteri Kabinet Kerja Jokowi. Diakses pada 1 April 2015 Pukul 10.51 WIB dari http://www.kemendagri.go.id/news/2014/10/27/daftar-lengkap-menteri-kabinet-kerja-jokowi
Dari Good Governance menjadi Democratic Governance	Pada tahun 2011 Pemerintah Republik Indonesia menyepakati Declaration of Principles on Open Government yang melahirkan Open Government Partnership (OGP).	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku II</i> . Jakarta: Bappenas. Hal. 1-4

JUDUL	DATA	SUMBER
	9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2015). 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi. Diakses pada 31 Maret 2015 Pukul 21.45 dari http://www.menpan.go.id/video-gallery/87-9-program-percepatan-reformasi-birokrasi
	Sasaran	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta: Bappenas. Hal. 6-22
Membangun Indonesia Dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah2 Dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan		
Makmur Indonesia Timur	Selama 30 tahun (1983-2013) terakhir, kontribusi ekonomi Kawasan Barat Indonesia sangat dominan dan tidak pernah berkurang dari 80 persen terhadap PDB Indonesia.	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta: Bappenas. Hal. 6-37
	103 dari total 122 kabupaten di Kawasan Timur Indonesia (KTI) adalah kabupaten tertinggal	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku II</i> . Jakarta: Bappenas. Hal. 8-25
	19 kabupaten tertinggal di Kawasan Barat Indonesia (KBI)	
	26 dari 29 kabupaten atau di provinsi Papua adalah daerah tertinggal	
	Terwujudnya 39 pusat pertumbuhan baru, mencakup: 27 pusat tersebar di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan 12 pusat tersebar di Kawasan Barat Indonesia (KBI).	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta: Bappenas. Hal. 6-40
	Akan dibangun 13 kawasan industri baru di wilayah koridor ekonomi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua	
	Percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur di wilayah pertumbuhan. Membangun 2.650 kilometer jalan arteri dan 1.000 kilometer jalan tol.	
	Membangun 3.258 kilometer jalur kereta api. Mengembangkan 24 pelabuhan untuk mendukung tol laut.	
	15 bandara baru dan mengembangkan bandara yang ada, pengembangan 9 bandara untuk pelayanan kargo udara	
	Arah Kebijakan	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta: Bappenas. Hal. 6-40, 6-41
	Sasaran	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta: Bappenas. Hal. 6-39
Menanggulangi Kemiskinan, Mengurangi Ketimpangan	Pada tahun 2014, presentase jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 11,25 persen atau 28,28 juta jiwa (Data BPS).	BPS. (2014). Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro 2014. Diakses pada 1 April 2015 pada pukul 10.54 dari http://www.bps.go.id/website/pdf/publikasi/watermark%20Penghitungan_dan_Analisis_Kemiskinan_Makro_2014.pdf
	Agar pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat maka: 1. Meningkatnya investasi padat pekerja 2. Meningkatnya akses usaha mikro dan kecil untuk mengembangkan keterampilan, pendampingan, modal usaha, dan pengembangan teknologi; 3. Terbentuknya kemitraan pemerintah, pemerintah daerah dan swasta/BUMN/BUMD 4. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi yang berkualitas; 5. Meningkatnya penjangkauan pelayanan dasar 6. Meningkatnya perlindungan sosial, produktivitas dan pemenuhan hak dasar bagi penduduk kurang mampu	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta: Bappenas. Hal. 6-48

JUDUL	DATA	SUMBER
	<p>Saat ini, Indonesia hanya menghabiskan 0,7% dari PDB (Pendapatan Domestik Bruto) untuk program-program bantuan sosial, dibandingkan dengan Brasil yang menggunakan 1,5% dari PDB-nya dan negara-negara berpenghasilan menengah rendah lainnya.</p> <p>Sekitar 68 juta penduduk Indonesia tetap rentan untuk jatuh miskin. Pendapatan mereka hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga miskin. Guncangan ekonomi seperti jatuh sakit, bencana atau kehilangan pekerjaan, dengan mudah dapat membuat mereka kembali jatuh miskin</p>	World Bank. (2014). Tingkat Penurunan Kemiskinan pada Tahun 2013 Terkecil dalam Satu Dekade Terakhir. Diakses pada 31 Maret 2015 Pukul 21.54 dari http://www.worldbank.org/in/news/press-release/2014/09/23/poverty-reduction-slows-inequality-increases-world-bank-reports
Menjemput yang Tertinggal	92 pulau terdepan	Bappenas. (2014). RPJMN Buku 1. Jakarta: Bappenas. Hal. 6-26
	12 Pulau berbatasan dengan laut lepas	Pasal 6 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 17/Permen/M/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan Kawasan Perbatasan
	80 pulau yang berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga	Pasal 6 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 17/Permen/M/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan Kawasan Perbatasan
	Tersebar di 9 provinsi sebagian besar berada di kepulauan Riau dan Maluku	Lampiran I Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar
	Luas pulau antara 0,002-2000 km2	Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar
	Desa sangat tertinggal 17.268 di 419 Kab/Kota, 5.204 nya ada di Papua	Pemerintah Kabupaten Deiyai. (2015). Daerah Tertinggal Terbanyak di Papua. Diakses pada 31 Maret 2015 pukul 22.05 dari http://deiyaikab.go.id/kegiatan/324/daerah-tertinggal-terbanyak-di-papua.htm
	122 kabupaten tertinggal, 33 nya ada di Papua	Pemerintah Kabupaten Deiyai. (2015). Daerah Tertinggal Terbanyak di Papua. Diakses pada 31 Maret 2015 pukul 22.05 dari http://deiyaikab.go.id/kegiatan/324/daerah-tertinggal-terbanyak-di-papua.htm
	Kebijakan Desentralisasi Asimetris	Bappenas. (2014). RPJMN Buku 1. Jakarta: Bappenas. Hal. 6-26
	Pengembangan daerah tertinggal	Bappenas. (2014). RPJMN Buku 1. Jakarta: Bappenas. Hal. 6-28
	Kawasan Perbatasan	Bappenas. (2014). RPJMN Buku 1. Jakarta: Bappenas. Hal. 6-26
Memperkuat Kehadiran Negara Dalam Melakukan Reformasi Sistem Dan Penegakan Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat Dan Terpercaya		
Melestarikan Alam, Melestarikan Masa Depan	kerugian Rp 83 miliar per hari atau senilai Rp 30,42 triliun per tahun akibat penebangan liar (illegal logging),	http://finance.detik.com/read/2014/07/04/084730/2627544/4/jokowi-jk-karena-pencurian-ikan-negara-rugi-rp-300-triliun-tahun
	peredaran kayu ilegal yang mencapai 50,7 juta meter kubik pertahun.	
	kerugian Negara akibat pencurian ikan (Illegal fishing) mencapai sekitar Rp.300 trilyun	http://kpk.go.id/index.php/berita/menteri-susi-illegal-fishing-tidak-bisa-dikompromi-dan-harus-di-stop/?print=pdf
	UNTuk menurunkan frekuensi dan luasan penebangan liar	Bappenas. (2014). RPJMN Buku 1. Jakarta: Bappenas. Hal. 6-58
	Untuk mengurangi illegal fishing	Bappenas. (2014). RPJMN Buku 1. Jakarta: Bappenas. Hal. 6-57 dan 6-58
	Untuk mengurangi penambangan liar	Bappenas. (2014). RPJMN Buku 1. Jakarta: Bappenas. Hal. 6-59 dan 6-60
	"Industri primer berbasis sumber daya alam 16,6 persen terhadap PDB nasional 8,8 juta lapangan kerja "	Bappenas. (2014). RPJMN Buku 2. Jakarta: Bappenas. Hal. 10-2
	"Industri berbasis pertanian, kehutanan dan perikanan 13,7 persen terhadap PDB nasional 8,6 juta lapangan kerja "	Bappenas. (2014). RPJMN Buku 2. Jakarta: Bappenas. Hal. 10-2

JUDUL	DATA	SUMBER
Indonesia Melawan Narkoba	Di Indonesia, 60% atau 27.000 penghuni lapas adalah terkait kejahatan narkotika.	Paparan "Slamet Pribadi" BNN. Strategi Percepatan untuk Mewujudkan Indonesia Bebas Narkoba dalam Bakohumas 25112014
	4 Juta orang harus diperbaiki kondisinya karena penyalahgunaan narkotika	Paparan "Slamet Pribadi" BNN. Strategi Percepatan untuk Mewujudkan Indonesia Bebas Narkoba dalam Bakohumas 25112014
	10% atau 34 varian zat baru narkotika, didapatkan di Indonesia. Saat ini 356 zat baru telah diidentifikasi dari seluruh dunia.	Paparan "Slamet Pribadi" BNN. Strategi Percepatan untuk Mewujudkan Indonesia Bebas Narkoba dalam Bakohumas 25112014
	Kebijakan:	Bappenas. (2014). RPJMN Buku 2. Jakarta: Bappenas. Hal. 6-60
	Hukuman Mati Kasus Narkoba Indonesia, Singapura, Malaysia	Paparan "Slamet Pribadi" BNN. Strategi Percepatan untuk Mewujudkan Indonesia Bebas Narkoba dalam Bakohumas 25112014
	Narkoba, terorisme, dan korupsi digolongkan dalam Extra Ordinary Crime (Kejahatan Luar Biasa)*.	Paparan "Slamet Pribadi" BNN. Strategi Percepatan untuk Mewujudkan Indonesia Bebas Narkoba dalam Bakohumas 25112014
Mengatasi Benalu Negeri	Pada tahun 2014, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia ada di peringkat 107 dari 175 negara yang disurvei Transparansi International. Posisi Indonesia jauh berada di bawah Singapura (7), Malaysia, Filipina, dan Thailand (85)	Bappenas
	Upaya untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi	Bappenas. (2014). RPJMN Buku 2. Jakarta: Bappenas. Hal. 146-147
Perlindungan pada Anak dan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • 1,1 juta anak laki-laki atau 1 dari 13 anak laki-laki mengalami kekerasan seksual ketika usia mereka belum mencapai 18 tahun. • 800 ribu anak perempuan atau 1 dari 18 anak perempuan mengalami kekerasan seksual ketika usia mereka belum mencapai 18 tahun. 	Kemensos RI. (2014). <i>Survey Kekerasan Terhadap Anak (SKTA) 2013 yang dipaparkan oleh Edi Suharto, PhD (Direktur Kesejahteraan Sosial Anak – Kemensos RI) disampaikan pada FGD "Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Ruang Publik, Kemenkominfo, Bogor 19 Juni 2014.</i> Jakarta:Kemensos RI. Hal.15
	Definisi Kelompok Marjinal	World Bank. (2015). <i>Indonesia luncurkan program berbasis pemberdayaan masyarakat untuk kelompok terpinggirkan.</i> Diakses tanggal 1 April 2015, pukul 10.40 WIB dari http://www.worldbank.org/in/news/feature/2011/03/23/indonesia-launches-community-driven-development-program-marginalized-people
	Bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku 1.</i> Jakarta:Bappenas. Hal. 6-62 dan 6-63
	Kebijakan dan Strategi	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku 1.</i> Jakarta:Bappenas. Hal. 6-62 dan 6-63
	Kebijakan untuk Perlindungan Kaum Marjinal	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku 1.</i> Jakarta:Bappenas. Hal. 6-62 dan 6-63
Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Dan Masyarakat Indonesia		
Ayo Sekolah!	(2011)peringkat ke-69 dari 127 negara.	USAID. (2015). <i>Kilas Balik Dunia Pendidikan di Indonesia.</i> Diakses pada tanggal 31 Maret 2015, pukul 22.46 WIB dari http://www.prestasi-ief.org/index.php/id/feature/68-kilas-balik-dunia-pendidikan-di-indonesia
	(2012) Peringkat ke-64 dari 120 negara	
	Menjamin dan memastikan seluruh anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu terdaftar sebagai penerima bantuan tunai pendidikan sampai lulus SMA/SMK/MA.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2015). <i>Kemendikbud Ajak Penerima KIP Segera Daftar Ke Sekolah.</i> Diakses pada tanggal 31 Maret 2015, pukul 23.12 WIB dari http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/node/3957

JUDUL	DATA	SUMBER
	Tahun 2015: Program Indonesia Pintar Jangkau 19,2 juta Anak.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2015). <i>Program Indonesia Pintar Jangkau 19,2 Juta Anak Tahun 2015</i> . Diakses pada tanggal 31 Maret 2015, pukul 23.00 WIB dari http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/berita/3804
	Kemdikbud mengusulkan penambahan anggaran dalam Rencana APBNP tahun 2015 sebesar Rp7,1 triliun	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2015). <i>Penerima KIP Bertambah, Mendikbud Usulkan APBN Perubahan Ke Banggar</i> . Diakses pada tanggal 31 Maret 2015, pukul 22.59 WIB dari http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/berita/3734
	Misi dalam Pendidikan <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan ketersediaan pendidikan 2. Meningkatkan keterjangkauan pendidikan 3. Meningkatkan kualitas pendidikan 4. Meningkatkan kesetaraan pendidikan 5. Mewujudkan tata kelola pendidikan 	Bappenas
	Sasaran Program Indonesia Pintar	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta:Bappenas. Hal. 6-67
Meningkatkan Kesehatan, Menjaga Masa Depan	Rata-rata angka stunting di Indonesia (37,2%)	Kementerian Kesehatan RI. (2015). <i>Program Indonesia Sehat untuk Atasi Masalah Kesehatan</i> . Diakses pada tanggal 31 Maret 2015, pukul 22.54 WIB dari http://www.depkes.go.id/article/view/15020400002/program-indonesia-sehat-untuk-atasi-masalah-kesehatan.html Riset Kesehatan Dasar 2013
	Definisi Stunting	
	Indeks pembangunan manusia, Indonesia peringkat 108 dari 187 negara	
	Penguatan layanan kesehatan <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesiapan 6.000 puskesmas di 6 regional 2. Terbentuknya 184 RS rujukan regional 	Bappenas
	Sasaran <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak 2. Meningkatnya pengendalian penyakit 3. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar 4. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal 5. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin 6. Meningkatnya responsivitas system kesehatan 	Bappenas
Perlindungan Hak Petani	Reformasi Agraria Tanah Hak (Termasuk HGU, Tanah Terlantar dan Tanah Transmigrasi): (2019) 1 juta ha	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta:Bappenas. Hal. 6-81
	Reformasi Agraria Kawasan Hutan yang akan Dilepaskan: (2019) 4.1 juta ha	
	Reformasi Agraria Tanah Milik Masyarakat dengan Kriteria Penerima Reforma Agraria: (2019) 3,9 juta ha	
	Sasaran Pengelolaan Aset Tanah: (2019) 9 Juta ha, (2015) 100.000 ha	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta:Bappenas. Hal. 6-81
	Kebijakan	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta:Bappenas. Hal. 6-81

JUDUL	DATA	SUMBER
Indonesia yang Produktif	Tahun 2025 proyeksi jumlah penduduk 284,8 juta	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta: Bappenas Hal 3-14
	Jumlah penduduk usia produktif 118,19 juta	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta: Bappenas Hal 3-14
	Ancaman Kependudukan	BKKBN. (2013). Ancaman Ledakan Penduduk. Diakses pada tanggal 1 April 2015, pukul 10.52 WIB dari https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CC8QFjAC&url=http%3A%2F%2Fjambi.bkkbn.go.id%2Ffinfoprogram%2FDocuments%2FAncaman%2520Ledakan%2520Penduduk.pdf&ei=JVsbVdjsEuLLmwXs0oGgAw&usq=AFQjCNG6j9i7tuxpQ_OS25Kh40AbOmv5OQ&sig2=x4v8x1FApHzC8lio4nCTRw
	Sasaran	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku II</i> . Jakarta: Bappenas Hal 2-76
Meningkatkan Produktivitas Rakyat Dan Daya Saing Di Pasar Internasional		
Membangun Konektivitas, Memeratakan Pembangunan	Pembangunan 24 Pelabuhan	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku II</i> . Jakarta: Bappenas Hal 9-33
	Pembelian 609 Kapal	???
	Pengertian Tol Laut	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta: Bappenas Hal 9-33
	Pembangunan 15 bandara baru	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku II</i> . Jakarta: Bappenas Hal 9-33
	Meningkatnya Jumlah Penumpang yang diangkut maskapai penerbangan nasional 162 juta	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku II</i> . Jakarta: Bappenas Hal 9-33
	pengembangan 9 bandara untuk pelayanan kargo	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku II</i> . Jakarta: Bappenas Hal 9-33
	Peningkatan ontime performance 95%	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku II</i> . Jakarta: Bappenas Hal 9-33
	Meningkatnya jumlah barang yang dapat diangkut oleh kereta api	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku II</i> . Jakarta: Bappenas Hal 9-34
	Menurunnya rasio angka kecelakaan KA	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku II</i> . Jakarta: Bappenas Hal 9-35
	Peningkatan Kapasitas Jalan 4200 lajur - kms	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku II</i> . Jakarta: Bappenas Hal 9-33
	Pembangunan Jalan baru sepanjang 2.650 km	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku II</i> . Jakarta: Bappenas Hal 9-33
	Pengembangan jaringan jalan (termasuk jalan tol) 6000 km	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku II</i> . Jakarta: Bappenas Hal 9-33
	pembangunan jalan tol sepanjang 1000 km	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku II</i> . Jakarta: Bappenas Hal 9-33
	Perbaikan jalan sepanjang 45.592 km seluruh pulau besar Indonesia	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku II</i> . Jakarta: Bappenas Hal 9-33
	pembangunan dan pengembangan 163 pelabuhan non komersial sebagai sub feeder tol laut	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku II</i> . Jakarta: Bappenas Hal 9-33
	Terbangunnya 50 kapal perintis	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku II</i> . Jakarta: Bappenas Hal 9-33
	Pengembangan 65 pelabuhan penyeberangan	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku II</i> . Jakarta: Bappenas Hal 9-34
	terlayani 193 lintas angkutan laut perintis	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku II</i> . Jakarta: Bappenas Hal 9-33
Membangun Transportasi Umum, Mengurangi Kemacetan	Jakarta sebagai kota paling macet di dunia	Magnatec Castrol. (2013). Istanbul, mexico city and moscow top the stop-start index. Diakses pada tanggal 31 Maret 2015, pukul 22.32 WIB dari http://www.castrol.com/en_au/australia/about-us/news-events/alerts/istanbul-mexico-city-and-moscow-top-the-stop-start-index.html
	Dari Jumlah kendaraan di Indonesia sebanyak 104.118.969 , 80% nya adalah epeda motor , 11% nya adalah mobil berpenumpang, 5% nya adalah truk, dan 2% nya adalah bis.	BPS. (2013). Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis tahun 1987-2013. Diakses pada tanggal 31 Maret 2015, pukul 22.41 WIB dari http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1413
	Rencana Sasaran 5 tahun ke depan	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku II</i> . Jakarta: Bappenas Hal 9-72

JUDUL	DATA	SUMBER
Hunian untuk Rakyat	Pemerintah akan membangun 2.250.000 rumah (dan akan meningkat menjadi 5 juta rumah pada 2019)	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku II</i> . Jakarta: Bappenas Hal 9-30
	Indonesia mengalami kekurangan pasokan rumah yang mencapai 15 juta unit	Kemenpera. (2013). <i>Kebutuhan Rumah di Indonesia Diperkirakan Capai 15 Juta Unit</i> . Diakses pada tanggal 31 Maret 2015, pukul 22.44 WIB dari http://www.kemenpera.go.id/?top=news&act=detaildata&id=1573
	Penyediaan Rumah Umum untuk 900.000 RT	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku II</i> . Jakarta: Bappenas Hal 9-30
	Penyediaan Rumah Susun Sewa 550.000 RT	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku II</i> . Jakarta: Bappenas Hal 9-30
	KPR Swadaya untuk 450.000 RT	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku II</i> . Jakarta: Bappenas Hal 9-30
	Pembangunan baru Rumah Swadaya untuk 250.000 RT	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku II</i> . Jakarta: Bappenas Hal 9-30
	Pembangunan Rumah Khusus di daerah Perbatasan 50.000 RT	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku II</i> . Jakarta: Bappenas Hal 9-30
	peningkatan kualitas rumah tidak layak huni 1,5 juta RT	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku II</i> . Jakarta: Bappenas Hal 9-30
	Tercapainya 100 persen pelayanan air minum pada 2019	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku II</i> . Jakarta: Bappenas Hal 9-30
	Tercapainya 100 persen pelayanan sanitasi pada 2019	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku II</i> . Jakarta: Bappenas Hal 9-30
	meningkatkan jangkauan layanan ketenagalistrikan 96,61%	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku II</i> . Jakarta: Bappenas Hal 9-31
	terlaksananya percepatan pembangunan tambahan pembangkit listrik baru sebesar 35,9 GW	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku II</i> . Jakarta: Bappenas Hal 9-31
	Rasio Elektrifikasi desa berlistrik 100%	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku II</i> . Jakarta: Bappenas Hal 9-31
	Pembangunan SPBG 118 unit	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku II</i> . Jakarta: Bappenas Hal 9-31
	meningkatnya jaringan pipa gas 18.322	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku II</i> . Jakarta: Bappenas Hal 9-31
	tersedianya gas 600.000 nelayan	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku II</i> . Jakarta: Bappenas Hal 9-32
	penambahan 1 unit kilang minyak bumi	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku II</i> . Jakarta: Bappenas Hal 9-31
BUMN sebagai Agen Pembangunan	suntikan modal Rp. 64,8 triliun	Sekretaris Kabinet. (2015). <i>Berkekuatan Rp 1.984 Triliun, Sidang Paripurna DPR-RI Setujui RAPBN-P 2015</i> . Diakses pada 1 April 2015 Pukul 11.20 WIB dari setkab.go.id/berkekuatan-rp-1-984-triliun-sidang-paripurna-dpr-ri-setujui-rapbn-p-2015/
	Reformasi BUMN:	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta: Bappenas. Hal. 6-112
	nilai asset 138 BUMN meningkat 88% dari Rp2.505 triliun pada tahun 2009 menjadi Rp4.216 triliun pada tahun 2013	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku II</i> . Jakarta: Bappenas. Hal. 3-24
	Kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara (dividen+pajak)	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku V</i> . Jakarta: Bappenas. Hal. II.M.L041-1
	11 BUMN masuk daftar Forbes 2000 pada 2015 dan akan naik menjadi 19 BUMN pada 2019	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku V</i> . Jakarta: Bappenas. Hal. II.M.L041-1
Bersaing di Pasar Global	Indeks Kompetitif Global (GCI) naik dari peringkat ke-38 menjadi peringkat ke-34 dari 144 negara	World Economic Forum. (2014). <i>The Global Competitiveness Index (GCI)</i> . Diakses pada 31 Maret 2015 Pukul 20.20 WIB dari http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/rankings/

JUDUL	DATA	SUMBER
	Rangking Indonesia Pada Indeks Kompetitif Global (GCI) 2010-2014	
	7 sektor dibuka	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta: Bappenas. Hal. 6-140
	Pekerja formal naik dari 40,5% di tahun 2014 menjadi 51% di tahun 2019	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta: Bappenas. Hal. 6-141
	Menaikan kinerja lembaga pelatihan pemerintah berbasis kompetensi dari 5% menjadi 25%	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta: Bappenas. Hal. 6-140
	Meningkatkan kualitas dan keterampilan pekerja dengan diadakannya pelatihan dan sertifikasi untuk pekerja berkeahlian tinggi dan keahlian menengah.	
	Jumlah pelatihan	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta: Bappenas. Hal. 5-11
	Jumlah sertifikasi	
	Jumlah tenaga kerja keahlian menengah	
Penguatan Investasi untuk Penguatan Ekonomi	Peringkat kemudahan dalam berbisnis naik 8 peringkat	World Bank Group. (2014). <i>Doing Business</i> . Diakses pada 31 Maret 2015 Pukul 20:39 dari http://www.doingbusiness.org/rankings
	Peringkat Indonesia dalam Ease of Doing Business (EoDB) 2011-2015	
	Sasaran	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta: Bappenas. Hal. 6-106
	Investasi PMA dan PMDN	
	Kebijakan <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha untuk meningkatkan efisiensi proses perijinan bisnis, meningkatkan kepastian berinvestasi dan berusaha di Indonesia, dan mendorong persaingan usaha yang lebih sehat • Peningkatan investasi yang inklusif terutama dari investor domestik. 	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta: Bappenas. Hal. 6-107
Menambah Laju Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi nasional ditarget mencapai 8% di tahun 2019.	Bappenas. (2014). <i>Strategi Pengurangan Ketimpangan dalam RPJMN 2015-2019</i> . Diakses pada 31 Maret 2015 Pukul 22:48 dari http://infid.org/pdfdo/1392709325.pdf
	Pertumbuhan Ekonomi 2010-2019	BNI Securities. (2015). <i>RPJMN Canangkan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Pada 2019</i> . Diakses pada 1 April 2015 Pukul 12.02 dari http://bnisecurities.co.id/2015/01/rpjmncanangkan-pertumbuhan-ekonomi-8-persen-pada-2019/ Bappenas. (2014). <i>Strategi Pengurangan Ketimpangan dalam RPJMN 2015-2019</i> . Diakses pada 31 Maret 2015 Pukul 22:48 dari http://infid.org/pdfdo/1392709325.pdf CNN Indonesia. (2015). <i>Jokowi Janjikan Pertumbuhan Ekonomi 7,8 Persen pada 2018</i> . Diakses pada 1 April 2015 Pukul 12.02 dari http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150126155744-78-27450/jokowi-janjikan-pertumbuhan-ekonomi-78-persen-pada-2018/
	Akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta: Bappenas. Hal. 6-118
	Sisi pengeluaran dan sisi produksi	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku II</i> . Jakarta: Bappenas. Hal. 3-61

JUDUL	DATA	SUMBER
Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakkan Sektor2 Strategis		
Menggenggam Harapan dari Lautan	Pengembangan Tol laut Untuk mendukung konektivitas dan sistem logistic dan meningkatkan aksesibilitas dengan pusat-pusat pengembangan ekonomi regional dan nasional serta mengembangkan jalur lalu lintas antarsamudera	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta: Bappenas. Hal. 6-175
	Menambah kapal perintis dan kapal penyeberangan	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta: Bappenas. Hal. 6-178
	Pengembangan 24 pelabuhan, termasuk hub internasional dan pelabuhan penyeberangan	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta: Bappenas. Hal. 6-175
	Mengembangkan industri galangan kapal kayu dan fiber glass	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta: Bappenas. Hal. 6-177
	Mengembangkan jalur lalu lintas antarsamudera, seperti jalur Singapura-Biak dan Laut Cina Selatan-Australia	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta: Bappenas. Hal. 6-177
	Pengembangan wisata bahari dan pulau-pulau kecil	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta: Bappenas. Hal. 6-175
	Peningkatan produksi perikanan hingga 2 kali lipat	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta: Bappenas. Hal. 6-175
	Pengembangan energi laut. Membangun 24 pelabuhan Perikanan	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta: Bappenas. Hal. 6-175
	Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta: Bappenas. Hal. 6-180
	Pemulihan kawasan pesisir yang rusak	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta: Bappenas. Hal. 6-178
	Penambahan luasan kawasan konservasi laut	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta: Bappenas. Hal. 6-178
Memperkuat Ketahanan Energi Nasional	Cadangan minyak Indonesia tinggal sekitar 4.03 milyar barrel, hanya cukup untuk 23 tahun lagi tanpa ada penemuan ladang baru	http://www.migas.esdm.go.id/wap/?op=Berita&id=2787 /// Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta: Bappenas. Hal. 6-164
	Sementara cadangan gas masih cukup sampai 50 tahun ke depan	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta: Bappenas. Hal. 5-8 (Tabel 5.1)
	batu bara cukup untuk 80 tahun mendatang	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta: Bappenas. Hal. 5-8 (Tabel 5.1)
	menguatnya ketersediaan energi primer dari produksi minyak bumi yang didukung oleh produksi gas bumi dan batubara;	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta: Bappenas. Hal. 6-164
	meningkatnya pemanfaatan sumber energi primer untuk penggunaan di dalam negeri	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta: Bappenas. Hal. 6-164
	terpenuhinya rasio elektrifikasi mencapai 96,6 persen	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta: Bappenas. Hal. 6-164
	penyediaan sarana dan prasarana energy	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta: Bappenas. Hal. 6-164

JUDUL	DATA	SUMBER
	pemanfaatan bahan bakar nabati	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta Bappenas. Hal. 6-164
	peningkatan bauran energi baru dan terbarukan	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta Bappenas. Hal. 6-164
	pengurangan subsidi energi	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta Bappenas. Hal. 6-164
	pembangunan kilang minyak sebanyak 1 unit dengan total kapasitas 300 ribu barel per hari	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta Bappenas. Hal. 6-164
	penambahan kapasitas penyimpanan	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta Bappenas. Hal. 6-164
	pembangunan Floating Storage Regasification Unit (FSRU)/ Regasification Unit/LNG Terminal;	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta Bappenas. Hal. 6-164
	pembangunan pipa gas 6.362 km;	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta Bappenas. Hal. 6-164
	pembangunan SPBG sebanyak 118 unit; dan	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta Bappenas. Hal. 6-164
	kapasitas terpasang pembangkit listrik sebesar 86,6 GW;	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta Bappenas. Hal. 6-164
	Produksi minyak diprediksi turun dari 818.000 barrel per hari pada 2014 menjadi 700 barrel per hari di 2019	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta Bappenas. Hal. 6-165 (Tabel 6.16)
	Sementara produksi gas Naik dari 1.224 barel setara minyak di 2014 menjadi 1.295 barel setara minyak per hari	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta Bappenas. Hal. 6-165 (Tabel 6.16)
	Turun dari 421 juta ton per hari di 2014 menjadi 400 juta ton per hari	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta Bappenas. Hal. 6-165 (Tabel 6.16)
Berdaulat Pangan di Negeri Agraris	82 Juta ton Target Produksi 2019 Dari 70,6 juta ton pada 2014	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta Bappenas. Hal. 6-147 (Tabel 6.14)
	18,4 Juta ton Perkiraan surplus neraca beras nasional pada periode 2015-2019	Http://www.bappenas.go.id/files/3713/9346/9271/RPJMN_Bidang_Pangan_dan_Pertanian_2015-2019.pdf
	Pada tahun 2017, Indonesia diharapkan bisa mencapai swasembada padi	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta Bappenas. Hal. 5-8 (Tabel 5.1)
	4 Strategi Utama Peningkatan Produksi Pangan Pokok 1 Peningkatan kapasitas produksi padi dalam negeri	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta Bappenas. Hal. 6-147
	2 Beroperasi dan terpeliharanya jaringan irigasi 7,3 juta Ha	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta Bappenas. Hal. 6-146
	3 Peningkatan produksi gula, daging, produk hortikultura	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta Bappenas. Hal. 6-147

JUDUL	DATA	SUMBER
	4 Peningkatan produksi Perikanan	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta Bappenas. Hal. 6-150
Menjaga Ketersediaan Air	Menyimpan air baik alami maupun yang tersimpan dalam bangunan penampung air.	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta Bappenas. Hal. 6-154
	Optimalisasi penampung air untuk Meningkatkan kapasitas tampung air per kapita	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta Bappenas. Hal. 6-154
	3 miliar meter kubik Pembangunan tampungan	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta Bappenas. Hal. 6-154
	Penyediaan energi terbarukan	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta Bappenas. Hal. 6-154
	Pengendalian banjir	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta Bappenas. Hal. 6-155
	Target, 5,5 juta hektar lahan kritis DAS direhabilitasi.	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta Bappenas. Hal. 6-154

JUDUL	DATA	SUMBER
	Membangun lembung dan 24 waduk	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta Bappenas. Hal. 6-154
	2014, Kapasitas tampung air 58,6m ³ /kapita sama dengan 3% dari kebutuhan ideal sebesar 1.975 m ³ /kapita	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku II</i> . Jakarta Bappenas. Hal. 9-12
Nyaman Berdampingan dengan Alam	Konservasi dan Tata kelola hutan	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta: Bappenas. Hal. 6-167
	Luas hamparan hutan Indonesia 52,3% atau 99,6 Hektar	Data Strategis Kehutanan 2005.
	Pengurangan Resiko bencana	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta: Bappenas. Hal. 6-168
Melakukan Revolusi Karakter Bangsa		
Revolusi Mental	Sasaran Revolusi Mental	Bappenas. (2014). <i>RPJMN Buku I</i> . Jakarta: Bappenas. Hal. 6-188
	Definisi Revolusi Metal	Karlina Rohima Supelli. (2014). Memahami Arti Revolusi Mental. Diakses pada tanggal 31 Maret 2015 pukul 22.05 dari www.president-indonesia.com



Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat
www.kominfo.go.id

PERPUSTAKAAN KEMENKO PMK

Bergerak dan bertumbuh 2015-2019



hb16-077



@ditppi



ditppi



Direktorat PPI

PER
KE